



KOMDIGI



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2025 - 2029

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN**

KABUPATEN BLITAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ini dapat disusun sebagai pedoman arah kebijakan dan langkah operasional dalam upaya peningkatan kualitas pemerintahan dan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Renstra ini merupakan hasil dari proses refleksi, kajian, dan dialog bersama berbagai unsur di dalam Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, yang berpijak pada kebutuhan riil di lapangan serta potensi lokal yang dapat dioptimalkan. Penyusunan Renstra ini dilandasi oleh semangat kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan tujuan utama menciptakan ekosistem pemerintahan yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada pembentukan karakter serta kompetensi generasi penerus bangsa.

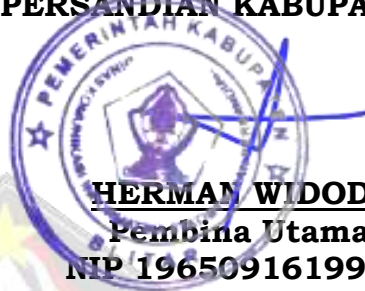
Dokumen ini memuat terjemahan visi dan misi kepala daerah yang telah *breakdown* ke dalam tujuan, sasaran, indikator kinerja, program, kegiatan dan sub kegiatan disertai dengan pagu indikatif pada rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Kami menyadari bahwa tantangan dalam pembangunan SDM di tingkat akar rumput tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut aspek sosial, budaya, dan kelembagaan. Kami berharap Renstra ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pihak dalam merancang dan melaksanakan program-program yang selaras dengan arah pembangunan daerah maupun nasional. Selain itu, dokumen ini juga diharapkan mampu mendorong lahirnya inovasi-inovasi lokal yang relevan dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.



Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan renstra ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter.

Blitar, 29 September 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN BLITAR**



HERMAN WIDODO, S.H.
Pembina Utama Muda
NP 196509161991121001



DAFTAR ISI

.....	1
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang	7
1.1.1. Latar belakang penyusunan Renstra	7
1.1.2. Pengertian dan Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	11
1.2. Dasar hukum dan penyusunan	14
1.3. Maksud dan Tujuan	16
1.4. Sistematika Penulisan	17
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS	19
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	19
2.1.1. Uraian Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.....	19
2.1.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.....	29
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan.....	40
2.1.5. Mitra dalam Pemberian Layanan.....	42
2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas.....	42
2.1.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab	42
2.2. Telaah Terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi	43
2.2.1. Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Digital RI 2025-2029....	43
2.2.2. Telaah Renstra Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025-2029.....	43
2.2.3. Telaah Renstra Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI Tahun 2025-2029	44
2.2.4. Telaah Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Jawa Timur 2025-2029.....	45
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis	48
2.3.1. Identifikasi Permasalahan pelayanan	48
2.3.2. Isu Strategis.....	53



TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	60
3.1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029	60
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	65
3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	68
3.4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	71
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	79
4.1. Uraian Program.....	79
4.2. Uraian Kegiatan.....	79
4.3. Uraian Sub Kegiatan	80
4.4. Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan, Serta Sub Kegiatan Prioritas Pendukung Program Pembangunan Daerah	100
4.4.1. Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif....	100
4.4.2. Uraian Sub Kegiatan Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	132
4.5. Target Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	137
4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	140
PENUTUP.....	143
5.1. Kesimpulan	143
5.2. Kaidah Pelaksanaan.....	144
5.3. Pengendalian dan Evaluasi.....	145



DAFTAR TABEL

2.1. Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Dinas Komunikasi, Informatika, statistik, dan Persandian	31
2.2. Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian.....	32
2.3. Rincian Aset Tahun 2025	33
2.4. Sarana dan Prasarana Dinas Kominfotiksan	34
2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kominfotiksan	36
2.6. Identifikasi Permasalahan	49
2.7. Isu Strategis Dinas Kominfotiksan Kabupaten Blitar	56
3.1. Peran Dinas Kominfotiksan dalam Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Blitar	65
3.2. Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029	68
3.3. Tahapan Renstra Dinas Kominfotiksan	72
3.4. Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan	74
4.1. Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	82
4.2. Rencana Program , Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif.....	102
4.3. Uraian Sub Kegiatan Dinas Komifotiksan Mendukung Program Prioritas Pembangunan	133
4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kominfotiksan.....	140
4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kominfotiksan	142



DAFTAR GAMBAR

1.1. Visi Misi RPJMD 2025-2029 Kabupaten Blitar	11
2.1. Struktur Organisasi Dinas Kominfotiksan	22
2.2. Rumusan Isu strategis Dinas Kominfotiksan Prov. Jawa Timur	47
3.1. Tujuan dan Sasaran Misi 3.....	62





BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Latar belakang penyusunan Renstra

Rencana Strategis adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi Perangkat Daerah kondisi pada masa depan. Di dalam Rencana Strategis digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui *feedback* yang sistematis.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan suatu keniscayaan dalam kerangka manajemen pembangunan yang terencana dan berkesinambungan. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah amanat regulasi yang disusun secara sistematis dan logis sebagai turunan dari sasaran kinerja pemerintah daerah yang tertuang di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dasar hukum penyusunan Renstra antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Kemudian, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memerintahkan Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan petunjuk



pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Renstra dilakukan secara sinergis dan sinkron dengan RPJMD menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pedoman Teknis diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Maka, berpijak pada upaya mewujudkan keterpaduan dan sinergisitas pembangunan, Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan untuk mewujudkan sinergitas Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bitar Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada.

Sehubungan dengan dilantikannya Bupati dan Wakil Bupati Blitar periode 2025-2029 yaitu **Drs. H. Rijanto, M.M. dan H. Beky Hendriansyah** pada bulan Februari 2026, maka pemerintah kabupaten Blitar memasuki era baru kepemimpinan untuk 5 tahun kedepan. Adapun Bupati memiliki visi-misi yang dituangkan dalam RPJMD yang mengilhami penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya.



Visi Kabupaten Blitar:

“KABUPATEN BLITAR BERDAYA DAN BERJAYA”

Misi Kabupaten Blitar:



Sumber: Dokumen RPJMD 2025-2029 Kab. Blitar, 2025

Gambar 1.1. Visi Misi RPJMD 2025-2029 Kabupaten Blitar

Bersamaan dengan itu, perangkat daerah juga menyusun Renstra PD untuk periode tahun 2025-2029 dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Blitar dengan memperhatikan penjabaran visi dan misi Bupati dan wakil Bupati serta tupoksi perangkat daerah. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, yaitu Misi ke 3 **“Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat”**, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra ini juga mengacu kepada berbagai dokumen perencanaan terkait, baik vertikal maupun horizontal. Secara vertikal

RPJMD berfungsi sebagai payung hukum dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 tahun, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh setiap perangkat daerah melalui Renstra PD. Renstra PD wajib berpedoman dan selaras dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD, serta mengoperasionalkannya ke dalam program dan kegiatan yang relevan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, sehingga memastikan seluruh perencanaan di tingkat perangkat daerah terintegrasi dan berkontribusi pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan. Maksud dirujuknya semua dokumen perencanaan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal dan horizontal antar Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman atau kerangka berpijak dalam penyelenggaraan organisasi dengan dasar kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal organisasi disusun dengan melibatkan stakeholder pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Kabupaten Blitar dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Blitar. Renstra juga merupakan dasar penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah untuk diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sekurang kurangnya memperhatikan/ mengacu pada perspektif keuangan, perspektif pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, perspektif pemberdayaan organisasi dan perspektif harapan pelanggan pengguna layanan dinas.



1.1.2. Pengertian dan Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Renstra perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan strategi atau arahan sebagai dasat dalam mengambil keputusan organissai. Sesuai Peraturan yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, pengertian Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dengan berakhirnya RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2021-2025, dan disusunnya RPJMD Kabupaten Blitar periode 2025-2029 maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyusun renstra tahun 2025-2029 dengan berdasarkan pada RPJMD yang baru. Tahapan yang dilaksanakan antara lain:

1. Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra PD;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD;
3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD;
4. Penyusunan Forum Perangkat Daerah/forum lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir;
6. Penetapan Renstra PD.

Berikut adalah penjelasan rangkaian Penyusunan Rencana Strategis PD:

1. *Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah*

Tahapan persiapan penyusunan Renstra perangkat daerah dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renstra PD yaitu :

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;



- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. *Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD.*

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD yaitu mencakup :

- a. analisis gambaran pelayanan;
 - b. analisis permasalahan;
 - c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. analisis isu strategis;
 - e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD; - 57 -
 - f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
 - g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
3. *Peyusunan Rancangan Akhir Renstra PD*

Dalam tahap ini Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dimana hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dituangkan kedalam Berita Acara kesepakatan Rancangan Akhir Renstra PD. Tahap selanjutnya adalah dilakukan verifikasi oleh Bappeda dan apabila ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan



saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.

4. *Penyusunan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah*

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA yang dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah. Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah.

5. *Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD*

Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

6. *Penetapan Renstra PD*

Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada BAPPEDA untuk diverifikasi dan disampaikan paling lambat 1 minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.



1.2. Dasar hukum dan penyusunan

Landasan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur



Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-3406 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Kementrian Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementrian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah dan Rencanan Strategis Perangkat Daerah 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar (RPJMD) Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Bupati Blitar Nomor 110 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra PD) disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

a. Maksud :

Memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun



berpedoman pada RPJMD Kabupaten Blitar selama jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

b. Tujuan :

Penyusunan Renstra ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;
2. Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan;
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektifitas kinerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik;
5. Menjadi pedoman dan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan RKA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar hukum penyusunan
- 1.3. Maksud Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organissai Perangkat Daerah
 - 2.1.2. Sumber daya Perangkat Daerah;



- 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; dan
- 2.1.4. Kelompok sasaran layanan
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Permasalahan pelayanan Perangkat daerah; dan
 - 2.2.2. Isu strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra PD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029;
- 3.2. Sasaran Renstra PD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029;
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029; dan
- 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Uraian Program;
- 4.2. Uraian Kegiatan;
- 4.3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indicator, target, dan pagu indikatif;
- 4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program prioritas pembangunan daerah;
- 4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
- 4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V. PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan Substansi
- 5.2. Kaidah Pelaksanaan
- 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi





BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

2.1.1. Uraian Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Blitar Nomor 110 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

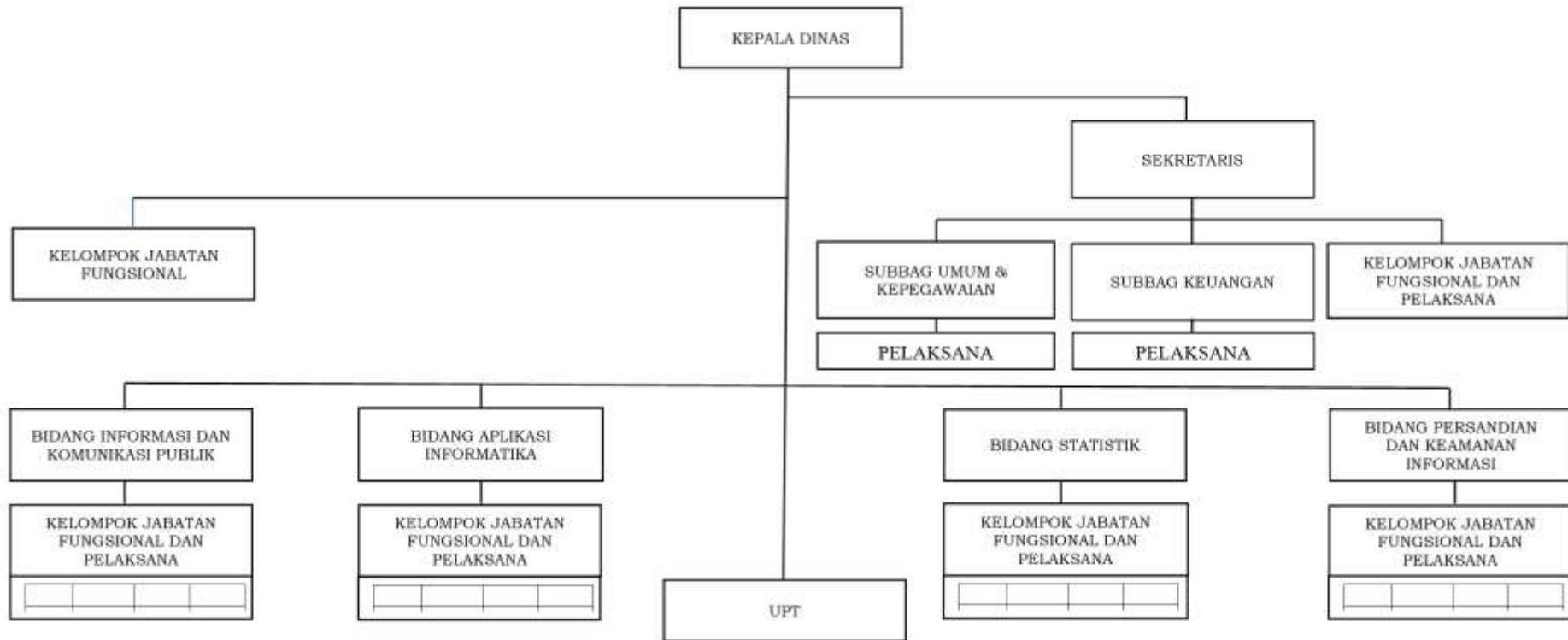
1. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian ;
 - c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian ;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian sesuai Peraturan Perundang-undangan



- e. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
- f. Pelaksanaan Tugas Dinas lain yang diberikan oleh Bupati.



Berikut adalah Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar sesuai dengan lampiran Peraturan Bupati Blitar Nomor 110 Tahun 2022.



BUPATI BLITAR

ttd

.....

Sumber: Peraturan Bupati Blitar Nomor 110 Tahun 2022, 2022

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian



Adapun tugas dan fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik serta tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian perumusan rencana dan program kerja Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. penyusunan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, data dan statistik;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, data dan statistik;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- e. pembinaan UPTD; dan
- f. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan laporan, menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan dinas.

Dalam melaksanakan tugas-tugas sekretariat, Sekretaris mempunyai fungsi :



- a. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Sekretariat;
- b. Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. Pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- g. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non-yustisia) dibidang kepegawaian;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan tugas bidang;
- k. Pengelolaan kearsipan;
- l. Pelaksanaan pemantauan serta evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- m. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugasnya membawahi :

2.1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan



penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; dan

- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat;
- e. menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi;
- h. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- i. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris.

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Kehumasan Pemerintah



Daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik;
- b. pelaksanaan sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik;
- c. pelaksanaan monitoring informasi kebijakan, opini publik, dan aspirasi publik;
- d. pelaksanaan penyusunan strategi komunikasi publik;
- e. pelaksanaan penyusunan konten;
- f. Pelaksanaan diseminasi informasi dan pengelolaan media komunikasi publik;
- g. pelaksanaan pelayanan informasi publik;
- h. pelaksanaan relasi media;
- i. pelaksanaan kemitraan komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat;
- j. pelaksanaan penguatan kapasitas sumber daya manusia komunikasi publik; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, subdomain di lingkup Pemerintah Daerah, dan pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah.

. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Informatika mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);



- b. pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengelolaan nama domain pemerintah desa;
- c. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan tata kelola, manajemen, proses bisnis, dan infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
- d. koordinasi pemanfaatan Pusat Data Nasional;
- e. penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah kabupaten.
- f. koordinasi pemanfaatan portal pelayanan pemerintah daerah yang terintegrasi;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan audit teknologi informasi dan komunikasi;
- h. koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan aplikasi umum SPBE;
- i. penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah;
- j. penyediaan akses internet;
- k. pelaksanaan promosi literasi SPBE;
- l. pelaksanaan kolaborasi penyelenggaraan SPBE;
- m. pelaksanaan penguatan kapasitas sumber daya manusia Aplikasi Informatika;
- n. pengelolaan data dan informasi daerah (pusat data daerah);
- o. fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital dan ekonomi digital;
- p. penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLP-D) dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan;
- q. penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dengan pendekatan kota cerdas; dan



- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Bidang Statistik

Kepala Bidang Statistik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Statistik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan statistik sektoral;
- b. penyusunan kebijakan penyelenggaraan statistik sektoral;
- c. pengoordinasian, sinkronisasi, serta fasilitasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan statistik sektoral;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta pelaporan hasil penyelenggaraan statistik sektoral;
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang persandian untuk penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten serta penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Persandian dan Keamanan Informasi menyelenggarakan Fungsi :

- a. penyusunan kebijakan tata kelola persandian dan keamanan informasi;
- b. pengelolaan sumber daya persandian dan keamanan informasi;
- c. pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah berbasis elektronik dan non elektronik;



- d. penyediaan layanan persandian dan keamanan informasi pemerintah daerah;
- e. penyelenggaraan pola hubungan sandi antar perangkat daerah kabupaten;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyampaian laporan terkait persandian dan keamanan informasi; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa Jabatan Fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diduduki oleh Pejabat Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris atau Kepala Bidang.
- f. Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Sekretaris atau Kepala Bidang
- g. Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.



- h. Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur dan tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas

- a. UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas.
- b. UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- c. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Untuk menjalankan sebuah organisasi dibutuhkan sumber daya yaitu berupa Personil dan peralatan serta perlengkapan sebagai media untuk melaksanakan pelayanan di PD, tanpa sumberdaya maka pelayanan yang ada di PD mustahil dapat dilaksanakan. Berdasarkan data kepegawaian yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bitar sampai dengan bulan Juni 2025, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar sebanyak 51 (lima puluh dua) orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang, Tenaga Kontrak Kerja sebanyak 14 (empat belas) orang. Berdasarkan Gender, Komposisi pegawai di



Lingkungan dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar pada bulan Agustus 2025, sebagai berikut:

1. Laki-laki sebanyak 33 orang
2. Perempuan sebanyak 18 orang

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No	Uraian	Golongan/PNS								Jumlah		Total
		I		II		III		IV		L	P	
		L	P	L	P	L	P	L	P			
1	Kepala Dinas							1		1		1
2	Sekretariat								1		1	1
3	Kepala Bidang Aplikasi Informatika							1		1		1
4	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik							1		1		1
5	Kepala Bidang Data dan Statistik								1		1	1
6	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi								1		1	1
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian						1				1	1
7	Kepala Sub Bagian Keuangan						1				1	1
8	Jabatan Fungsional Pranata Humas Ahli Muda					1						1



No	Uraian	Golongan/PNS								Jumlah		Total
		I		II		III		IV		L	P	
		L	P	L	P	L	P	L	P			
9	Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda					2				2		2
10	Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama					2	1			2	1	3
11	Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Muda					2				2		2
12	Jabatan Fungsional Sandiman Ahli Pertama					1				1		1
13	Seksi Persandian											-
14	Staf PNS			1		6	3			7	3	10
15	Staf PPPK					4	6			4	6	10
	Jumlah ASN			1		18	12	3	3	22	15	37
15	Tenaga Kontrak									11	3	14
	Jumlah Keseluruhan									33	18	51



Tabel 2.2.
Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No	Uraian	Jumlah		Total
		L	P	
1	Pembina Utama Muda	1		1
2	Pembina Tingkat I		1	1
3	Pembina	2	2	4
4	Penata Tingkat I	4	1	5
5	Penata	1	2	3
6	Penata Muda Tingkat I	5	2	7
7	Penata Muda	1	2	1
8	Pengatur Tingkat I	1		1
9	Pengatur	1		1
TOTAL				30

Sedangkan untuk rincian aset yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian per bulan September Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Rincian Aset Tahun 2025

No	Kode Barang	Nilai BMD Periode Tahun 2025		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
A	Aset Tetap	11.835.353.676,00	16.707.500,00	11,852.061.176,00
	1 Tanah	-	-	-
	2 Peralatan dan Mesin	11.362.200.709,00	16.707.500,00	11.378.908.209,00
	3 Gedung dan Bangunan	473.152.967,00	-	473.152.967,00
	4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-



No	Kode Barang		Nilai BMD Periode Tahun 2025		
			Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
	5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
B	Aset Lainnya		644.536.863,00	-	644.536.863,00
	1	Aset Tak Berwujud	644.536.863,00	-	644.536.863,00
	2	Aset lain-lain	-	-	-
C	Jumlah Aset Tetap dan Aset Lainnya		11.479.890.539,00	16.707.500,00	12.496.598.039,00
D	Ekstrakompetable		-	-	-

Tabel 2.4.

Sarana dan Prasarana Serta Usulan Penambahan Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No	Nama Barang	Jumlah			
		Maksimal	Kondisi Baik Rill	Kebutuhan Rill	Ajuan
1	Lemari ES	4	1	3	1
2	Lemari dan Arsip Pejabat Lainnya	12	7	5	2
3	Printer (Peralatan PC)	10	8	2	1
4	Mesin FC Elektronik	1	0	1	1
5	PC Unit	10	6	4	3
6	Alat Pemadam/Portabel	2	0	2	1
7	Laptop	7	4	3	1
8	Ecternal/Portabel Hardisk	10	2	8	3
9	Mesin Cuci Kendaraan /Car Washer	1	0	1	1
10	Dispenser	6	4	2	1
11	Kursi Kerja Pegawai Non-Struktural	10	6	4	2
12	Audio Mixing Portabel	2	0	2	1
13	Analog/digital Recevier	5	0	5	5
14	Televisi	3	1	2	1
15	Camera Converence	3	1	2	1



16	Meja Kerja Besi/ Metal	10	4	6	6
17	Rak Besi	4	0	4	4
18	Utility Trolley	2	0	2	2
19	Audio Command Desk	2	0	2	1
20	Printer (Peralatan PC)	3	2	1	1
21	Laptop	5	4	1	1
22	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	1	0	1	1
23	Digital Multimeter	1	0	1	1
24	CCTV	6	2	4	4
25	Digital Tang Ampere	1	0	1	1
26	Wireless Access Point	3	0	3	3
27	Switch	20	0	10	10
28	Router	10	0	9	9
29	Printer	9	4	1	1
30	Laptop	9	4	1	1

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebelum berdiri sendiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah (PD) pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bitar, urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika sebelumnya di jalankan oleh 2 (dua) PD yaitu :

1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bitar (Bidang Komunikasi dan Informatika) ;
2. Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Bitar ;

Setelah resmi berdiri sendiri sebagai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bitar pada akhir tahun 2016, kewenangan Bidang Komunikasi dan Informatika, dan Persandian pada kedua PD tersebut berpindah ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bitar sekaligus mengalami penambahan satu bidang yakni Data dan Statistik. Sedangkan sampai dengan Agustus tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mengampu 3 (tiga) urusan yaitu: Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan



Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Dalam pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar dapat diinventarisir beberapa faktor pendorong dan penghambat tercapainya kinerja perangkat daerah, yaitu:

Faktor Pendorong:

1. Adanya Peraturan Bupati Blitar tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
2. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal;
3. Adanya sumber daya manusia dan komitmen dari aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal;
4. Adanya dana dan dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah khususnya program dan kegiatan yang menyangkut pemerataan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
5. Adanya sarana dan prasarana sebagai modal utama pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan Faktor penghambat pencapaian kinerja adalah :

1. Kurang meratanya kemampuan IT sumber daya manusia pada dinas dan terbatasnya sarana dan prasarana/peralatan menyebabkan kurang maksimalnya pencapaian kinerja;
2. Kurang resposifnya koordinasi antar perangkat daerah dalam melakukan kolaborasi penerapan TIK, sehingga penerapannya dirasa masih kurang optimal dan menjadi penilaian yang buruk dalam penerapan TIK di setiap perangkat daerah;
3. Terbatasnya regulasi yang mengatur pengembangan TIK, informatika dan telekomunikasi;



4. Terkait implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE)/ Pemerintahan Digital (Pemdigi) masih ditemukan beberapa kendala mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan serta reviu yang belum maksimal;
5. Terkait pepadanan data untuk menuju Satu Data Indonesia, telah berada pada kondisi cukup stabil dan bagus mengingat telah masuk menjadi Nominasi ke 3 dalam Satu Data (SATA) Jatim Award 2025.

Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar pada tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat digambarkan dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam tabel 2.5. sebagai berikut :



Tabel. 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Blitar (IKU 2020-2024)

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target					Realisasi					Rasio Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Predikat PPID	A	A	0	0	0	A	A	0	0	0	100%	100%	0	0	0
2	Persentase Sistem Informasi yang Aktif	90%	92%	0	0	0	90%	92%	0	0	0	100%	100%	0	0	0
3	Persentase Data Pembangunan Daerah yang tepat waktu	100%	90%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	111,11 %	100%	100%	100%
4	Nilai SAKIP PD	A	A	A	A	A	BB	BB	BB	BB	B	90%	90%	90%%	90%	80%
5	Nilai Tata Kelola SPBE	0	4,22	2,8	2,8	0	0	2,6	2,3	3,6	0	0	61,6%	85,14 %	128,57 %	0
6	Nilai Layanan SPBE	0	4,28	3,8	3,8	0	0	3,2	3,51	4,07	0	0	74,76 %	92,36 %	107,10 %	0
7	Indeks SPBE	2,9	3,2	3,4	3,6	3,95	2.90	2.76	2.61	3.63	3.77	100%	86,25 %	76,76 %	100,8 %	95,44 %



Dari tabel pencapaian kinerja layanan di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Predikat PPID yang semula memiliki target A sudah tercapai di tahun 2023 dan 2024 prestasinya berupa Badan Publik Informatif yang hanya perlu ditingkatkan lagi skornya. perubahan predikat ini disebabkan oleh berlakunya Peraturan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi ,Standar Layanan Informasi adalah peraturan yang saat ini digunakan dan menetapkan kategori layanan informasi yang dibagi menjadi: Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif, dan Tidak Informatif. Predikat Informatif ini adalah predikat tertinggi dan terbaru yang menunjukkan bahwa badan publik telah memenuhi standar layanan informasi yang ditetapkan oleh Komisi Informasi, yaitu dengan menyediakan informasi secara terbuka, mudah diakses, dan relevan bagi masyarakat. Adapun untuk tahun 2025 masih akan dilakukan penilaian pada bulan September 2025 sehingga belum bisa disajikan hasilnya.
2. Persentase Sistem Informasi yang aktif diukur di tahun 2020 dan 2021 dengan target yang mampu dicapai secara keseluruhan, adapun tahun 2022 hingga 2024 indikator ini tidak diukur, sebagaimana tidak diminta untuk melakukan pengukuran dalam rangka kelengkapan data penyajian LPPD Kabupaten Blitar.
3. Persentase data Pembangunan Data Pembangunan Daerah yang tepat waktu, sepanjang tahun mampu mencapai target dan ada satu tahun yang melampaui target;
4. Indeks SPBE tahun 2021-2023 menurun karena beberapa faktor diantaranya : kurangnya komitmen kepala badan/dinas/bagian yang berkontribusi dalam penilaian SPBE, kurangnya kualitas SDM pengelola SPBE, dan beberapa kali terjadi perubahan komposisi indikator penilaian, baik perubahan indikator maupun penambahan indikator;
5. Nilai SAKIP PD dari target A hanya mampu mmencapai BB bahkan pada tahun terakhir menurun menjadi B, dikarenakan rendahnya skor pada area Pelaporan Kinerja, pada umumnya dalam



penyusunannya memang masih kurang sistematis dan periodik, dikarenakan banyaknya giat bidang teknis dan kurangnya jumlah dan kualitas SDM pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sehingga kurangnya pemerataan distribusi tugas menjadi penghambat.

6. Nilai Tata Kelola SPBE meskipun tidak selalu mencapai target akan tetapi memiliki tren naik/meningkat bahkan pada tahun 2023 melampaui target;
7. Nilai Layanan SPBE meskipun tidak selalu mencapai target akan tetapi memiliki tren naik/meningkat bahkan pada tahun 2023 melampaui target;

Untuk capaian program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar tahun 2020 - 2024 secara umum juga berhasil dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan Program/Kegiatan tersebut selalu dilakukan review apakah dalam tahun bersangkutan terdapat program/kegiatan yang harus segera dilaksanakan mengingat kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar juga mengacu pada kebijakan pemerintah daerah yang terkadang mengalami rasionalisasi atau perubahan yang sedikit banyak juga mempengaruhi pencapaian kinerja perangkat daerah.

Dalam rentang waktu tahun 2020 - 2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melaksanakan 5 (lima) program yang terurai dalam 12 (dua belas) kegiatan, dan 36 sub kegiatan Adapun pelaksanaan capaian program/kegiatan selama selama rentang 5 (lima) tahun yang lalu adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari 3 (tiga kegiatan) dan 3 (tiga) sub kegiatan;
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan;



4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan;
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

Pencapaian target Indikator Kinerja Utama PD, Program maupun Kegiatan tahun 2020 sd 2024 yang cukup baik ini didukung oleh komitmen yang kuat dari kepala dinas dan seluruh jajarannya untuk melaksanakan pelayanan publik semaksimal mungkin guna mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna mengemban Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih terutama **Misi ke 3 (tiga) yaitu Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat.**

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan adalah individu, kelompok, atau Masyarakat yang menjadi target dari pelayanan atau kegiatan tertentu berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dengan merujuk pada siapa yang ingin dibantu atau diberdayakan. Secara umum sasaran layanan Diskominfo taksan meliputi

1. Pimpinan Daerah.
2. Perangkat Daerah lainnya.
3. Masyarakat Umum.
4. Media dan Pers.
5. Sektor swasta.

Diskominfo taksan berperan sebagai penyedia infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang handal dan aman, pengembangan serta pengelolaan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung operasional dan pelayanan masing-masing PD. Selain itu, Diskominfo taksan memiliki tanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik sektoral yang akurat dan relevan, menjadi landasan penting bagi perencanaan, monitoring, dan evaluasi program

serta pengambilan keputusan strategis di tingkat perangkat daerah. Diskominfo juga bertugas menyediakan layanan komunikasi dan informasi publik yang efektif bagi PD lainnya. Hal ini mencakup dukungan dalam penyebarluasan informasi terkait program, kebijakan, dan capaian masing-masing perangkat daerah kepada masyarakat luas. Pada Masyarakat umum layanan diskominfo berfokus kepada digitalisasi dan infrastruktur IT seperti meringkas proses permintaan KTP dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini termasuk juga bentuk layanan kepada pihak swasta seperti perijinan usaha yang menggunakan aplikasi. Dengan menyediakan infrastruktur, sistem informasi, data statistik, dan layanan komunikasi yang berkualitas, Diskominfo menjadi elemen krusial dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten/kota.



2.1.5. Mitra dalam Pemberian Layanan

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang trnsparan, cepat dan inklusif, perlu adanya kemitraan strategis dalam memberikan pelayanan dengan berbagai pihak. Kemitraan ini menjadi fondasi penting dalam pengembangan ekosistem layanan berbasis teknologi informasi yang responsive terhadap kebutuhan Masyarakat.

Adapun mitra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut:

- a. Radio Persada
- b. Media Partner
- c. TIM PPID
- d. Komunitas Informasi Masyarakat
- e. Influencer
- f. Penyedia Layanan 112
- g. BPS Kabupaten Blitar
- h. BSSN RI
- i. BRIN

2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam Pemerintah Daerah tidak terdapat BUMD dalam mencapai Kinerja Perangkat Daerah.

2.1.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian bekerjasama dengan Lembaga berikut ini:

- a. BRIN RI
- b. BSSN RI
- c. BPS Kabupaten Blitar



2.2. Telaah Terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi

2.2.1. Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Digital RI 2025-2029

Pada saat penyusunan Renstra ini, dokumen resmi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Tahun 2025 – 2029 belum tersedia untuk publik. Namun, proses penyusunannya telah dimulai sejak awal 2024, dengan melibatkan berbagai pihak.

2.2.2. Telaah Renstra Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025-2029

A. Visi

”Lembaga yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusak Kebijakan Berbasis Data”

Dinas Kominfotiksan Kabupaten Blitar sebagai pengelola informasi dan statistik sektoral daerah harus mendukung penyediaan data yang valid, akurat dan tepat waktu. Visi ini menyatakan bahwa perlu adanya dorongan kolaborasi yang erta antara Dinas Kominfotiksan dengan BPS, terutama dalam membangun sistem data daerah yang terintegrasi ke dalam sistem nasional (Satu Data Indonesia).

B. Misi

Adapun Misi dari BPS RI antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyediakan Statistik berkualitas tinggi untuk publik dan pemerintah;
- 2) Memimpinsistem statistik nasional;
- 3) Mendorong penggunaan data dalam pengambilan kebijakan;
- 4) Meningkatkan kualitas layanan publik melalui digitalisasi data.



Berdasarkan Misi ini bahwa sangat penting bagi Statistik Sektorial yang menjadi salah satu bidang pada Dinas Kominfotiksan melaksanakan kolaborasi aktif dalam membangun statistik sektoral daerah yang sesuai dengan standar nasional. Dinas Kominfotiksan juga dalam hal ini menyajikan Statistik sektoral daerah yang terbuka dan mudah diakses melalui tata kelola data dan Statistik sektoral daerah yang terintegrasi dengan kebijakan nasional.

2.2.3. Telaah Renstra Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI Tahun 2025-2029

A. Visi

”Menjadi Institusi Terpercaya dalam Menjaga Keamanan Siber dan Sandi Negara dengan Menyinergikan Berbagai Pemangku Kepentingan untuk Ikut Serta Mewujudkan Keamanan Nasional dan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional”

B. Misi

Adapun Misi dari BSSN RI, sebagai berikut:

- 1) Menjamin keamanan informasi di sektor pemerintah, infrastruktur informasi kritikal nasional, dan ekonomi digital dalam mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- 2) Membangun dan menerapkan tata kelola keamanan siber dan sandi yang komprehensif;
- 3) Membangun kemandirian teknologi keamanan siber dan sandi dengan mendorong tumbuhnya industri dalam negeri di bidang keamanan siber;
- 4) Membangun mengoordinasikan, mengolaborasikan, dan mengoperasionalkan sisten identifikasi, dekteksi, mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan, dan pemulihan



terhadap ancaman, insiden, dan/atau serangan siber dan sandi;

- 5) Membangun budaya keamanan siber sebagai tatanan nilai budaya yang melekat dengan mendorong tumbuhnya budaya penggunaan internet yang aman dan nyaman oleh setiap warga negara Indonesia;
- 6) Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya keamanan siber dan sandi melalui proses pembelajaran dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan dengan didukung manajemen perkantoran secara transparan dan akuntabel.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Kominfo 2025-2029 yang berkaitan dengan Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempertimbangkan keselarasan dengan Visi dan Misi BSSN RI, khususnya dalam aspek keamanan siber dan persandian. Adapun langkah strategis yang dilakukan meliputi:

- a. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Keamanan Informasi;
- b. Penguatan Infrastruktur Keamanan Informasi;
- c. Mengoptimalkan Penerapan CSIRT.

2.2.4. Telaah Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Jawa Timur 2025-2029

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan menengah yang menjadi pedoman arah pembangunan sektor komunikasi, informatika, statistik, dan persandian selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2025–2029 dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Adapun Isu Strategis yang



dirumuskan oleh Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada gambar table berikut ini:

Potensi Daerah Yang menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian	Ketidakterpaduan sistem antar-OPD dan masih adanya 998 titik <i>blankspot</i>	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	<i>Automation, IoT, Digitization; Remote Work</i>	Pembangunan infrastruktur TIK yang merata dan berkualitas	Pemanfaatan TIK belum optimal dalam mendukung pembangunan	Integrasi sistem SPBE lintas-OPD dan penguatan infrastruktur digital daerah
	Layanan digital publik belum terintegrasi dan belum <i>citizen-centric</i>	Kesenjangan layanan dasar dan ketimpangan wilayah	<i>Everything is a Service; Smart Governance</i>	Transformasi pelayanan publik digital berbasis kebutuhan pengguna	Rendahnya inovasi pelayanan publik digital dan fragmentasi aplikasi	Pengembangan platform layanan terintegrasi berbasis <i>life journey</i> dan SSO
	Maraknya hoaks, konten ilegal, dan rendahnya literasi digital masyarakat	Rendahnya standar kualitas SDM; Disparitas akses informasi	<i>Digital misinformation; Threat to privacy & civil rights</i>	Perlindungan konsumen digital dan literasi informasi	Penyebaran disinformasi; belum optimalnya kontrol konten digital	Literasi digital inklusif dan penguatan sistem pengendalian informasi publik
	Satu Data belum optimal; data sektoral belum terintegrasi dan mutakhir	Lemahnya sistem pemantauan dan evaluasi pembangunan	<i>Big Data Governance; Evidence-based Policy</i>	Transformasi tata kelola data nasional dan penguatan statistik sektoral	Lemahnya integrasi data dan dashboard sektoral daerah	Penguatan Satu Data Daerah & pemanfaatan analitik untuk perencanaan
	Keamanan informasi belum andal; insiden siber meningkat	Rendahnya kesiapsiagaan terhadap ancaman digital dan siber	<i>Cybersecurity & Data Privacy Risks</i>	Penguatan sistem keamanan digital dan perlindungan data SPBE	Keterbatasan SDM dan sistem keamanan siber pemerintah daerah	Penerapan manajemen keamanan SPBE sesuai BSSN & pengembangan CSIRT daerah

Gambar 2.2. Rumusan Isu Strategis Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur

Sumber: Dokumen Renstra Dinas Kominfo Provinsi Jatim, 2025

Secara umum, Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Timur menegaskan peran strategis sektor komunikasi dan informatika dalam mendukung transformasi digital daerah, peningkatan transparansi, serta efektivitas tata kelola pemerintahan. Tujuan yang diusung, yaitu *“Meningkatkan layanan masyarakat serta tata kelola pemerintahan yang efektif, terbuka, melalui transformasi digital, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pengelolaan data sektoral, serta keamanan informasi*



yang terintegrasi”, menjadi landasan bagi seluruh kabupaten/kota untuk menyesuaikan arah kebijakan lokal.

Beberapa **arah kebijakan provinsi** yang relevan untuk dijadikan acuan bagi Dinas Kominfotiksan Kabupaten antara lain:

1. **Penguatan infrastruktur dan konektivitas digital (Program Jatim Infinity)** untuk mengatasi wilayah blankspot dan memperluas akses internet. Kabupaten dapat menindaklanjuti melalui kerja sama dengan penyedia layanan internet lokal, pengembangan jaringan WiFi publik, dan optimalisasi layanan internet desa.
2. **Integrasi layanan publik digital (Program Majapahit Digital / MajaDigi)** melalui pengembangan portal layanan terpadu berbasis *Single Sign-On*. Pemerintah kabupaten diharapkan mengadopsi prinsip *citizen-centric services* dalam membangun aplikasi dan sistem layanan publik lokal.
3. **Penguatan tata kelola data sektoral (Program Satu Data Jawa Timur)** dengan menstandarkan metadata, indikator, dan sumber data di tingkat kabupaten agar sinkron dengan provinsi dan nasional. Hal ini juga mendukung penerapan *data-driven policy*.
4. **Peningkatan keamanan informasi dan literasi digital (Program Jaguar Jatim)**, yang dapat diimplementasikan oleh kabupaten melalui pembentukan CSIRT daerah, pelatihan keamanan siber, serta kampanye literasi digital masyarakat.
5. **Peningkatan komunikasi publik dan partisipasi masyarakat (Program Kopilaborasi)**, yang dapat diterapkan di tingkat lokal melalui forum komunikasi masyarakat, pengelolaan media pemerintah daerah, dan pemanfaatan kanal digital untuk transparansi informasi.



2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1. Identifikasi Permasalahan pelayanan

Saat ini, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) di tingkat kabupaten/kota seringkali dihadapkan pada sejumlah permasalahan pelayanan yang menghambat optimalisasi tugas dan fungsinya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur TIK yang memadai, termasuk konektivitas internet yang belum merata dan stabil di seluruh wilayah, serta kurangnya perangkat keras dan lunak yang mutakhir. Hal ini berdampak pada lambatnya proses digitalisasi layanan pemerintah daerah, terhambatnya integrasi sistem informasi antar Perangkat Daerah, dan kurang optimalnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang TIK dan statistik seringkali menjadi kendala, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kurangnya tenaga ahli yang kompeten dalam pengelolaan jaringan, pengembangan aplikasi, analisis data, dan keamanan siber menyebabkan ketergantungan pada pihak ketiga atau penanganan masalah yang kurang efektif.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah belum optimalnya tata kelola data dan informasi. Seringkali, data tersebar di berbagai PD tanpa adanya standar format dan interoperabilitas yang baik, menyulitkan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data statistik yang akurat dan tepat waktu. Keamanan siber juga menjadi isu krusial, mengingat semakin banyaknya layanan pemerintah yang berbasis digital, potensi ancaman kebocoran data dan serangan siber menjadi semakin tinggi. Selain itu, belum optimalnya pemanfaatan platform komunikasi digital untuk penyebarluasan informasi publik dan interaksi dengan masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Kurangnya inovasi dalam penyediaan konten informasi yang menarik dan mudah diakses, serta minimnya pemanfaatan media sosial dan platform daring lainnya, dapat menghambat diseminasi informasi yang efektif dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Permasalahan yang terjadi dimuat dalam bentuk table berikut ini:



Tabel 2.6.
Identifikasi Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
Urusan Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis digital yang Belum Mencapai Optimalitas	Tata kelola dan kebijakan pelayanan publik yang belum optimal	Birokrasi yang Kompleks dan Prosedur yang Panjang	Pelayanan yang belum optimal dan kurang Efisien
				Kepatuhan terkait regulasi dan standar nasional yang masih kurang
		Penerapan teknologi digital pada layanan publik dan administrasi pemerintahan masih belum sepenuhnya optimal	Infrastruktur dan ekosistem TIK yang Belum Memadai	Kurangnya jumlah SDM di Bidang TIK
				Kurangnya kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas SDM bidang literasi digital
				Optimalisasi kapasitas akses ruang <i>free wifi zone</i> ke kelurahan dan desa, Fasum dan Fasos, Fasilitas Pendidikan, digitalisasi UMKM.
				Kurangnya ketersediaan anggaran dalam mendukung pelayanan publik
				Tantangan Integrasi Sistem dan Koordinasi Antar Instansi
				Penerapan teknologi terbaru yang masih kurang seperti bigdata, AI, blockchain, WEB3
				Masih rendahnya literasi digital dan peran serta pentahelix dalam ekosistem pemerintah digital
				Fragmentasi layanan digital yang menyulitkan akses pengguna (warga)
Belum adanya satu portal pelayanan terintegrasi	Inefisiensi operasional pemerintah dalam pengelolaan layanan			
	Belum optimalnya arsitektur dan peta rencana pemerintah digital terutama terkait keterpaduan perencanaan dan implementasi			



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
				<p>Pengalaman pengguna (warga) yang tidak konsisten dan membingungkan</p> <p>Hambatan dalam analisis data untuk peningkatan layanan</p> <p>Kurangnya aksesibilitas dan inklusivitas bagi seluruh masyarakat</p> <p>Risiko keamanan dan privasi data yang lebih tinggi</p>
	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah belum optimal	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah belum optimal	Kurang Optimalnya Relasi dengan Media	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah media dan wartawan semakin banyak; Perlu regulasi dan implementasi standarisasi media yang bekerjasama dengan pemerintah daerah; Perlu kegiatan rutin gathering insan media; Perlu tim evaluasi kerjasama media. Mindset sebagai pengampu Marketing dan Branding Daerah masih belum diterapkan secara optimal.
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat			<ul style="list-style-type: none"> Potensi demografi yang besar belum diimbangi dengan jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang besar; Perlu sosialisasi program kemitraan komunikasi dan pembentukan komunitas informasi masyarakat; Perlu penyusunan kegiatan kemitraan komunikasi; Perlu evaluasi dan apresiasi program kemitraan dan eksistensi komunitas informasi masyarakat. Perlunya merevitalisasi <i>KIM</i> sampai tingkat pemerintah kelurahan dan desa. 	
Belum Optimalnya Pelayanan Informasi Publik			<ul style="list-style-type: none"> Perlu sosialisasi implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik bagi Badan Publik dan Masyarakat; Perlu regulasi/pedoman, SOP pelayanan informasi bagi Badan Publik; Perlu penguatan PPID Utama dan PPID Pelaksana melalui bimbingan teknis dan pendampingan; Perlu evaluasi, apresiasi, dan rekomendasi perbaikan secara berkala terhadap badan publik atas implementasi UU Keterbukaan Informasi. 	



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
				<ul style="list-style-type: none"> • Perlu media center daerah sebagai pusat informasi untuk marketing dan branding daerah.
			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik / Belum optimalnya penguatan opini positif terhadap Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu pedoman/SOP monitoring informasi kebijakan, opini, dan aspirasi; • Perlu penguatan SDM yang menangani monitoring informasi kebijakan, opini, dan aspirasi; • Perlu digitalisasi, otomatisasi pengelolaan monitoring informasi kebijakan, opini, dan aspirasi; • Perlu evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut secara berkala terhadap produk monitoring informasi kebijakan, opini, dan aspirasi. • Diperlukan sarana untuk monitoring berita tentang Pemerintah Kabupaten Blitar
			Belum Optimalnya Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Portal Berita Daerah / Belum ada Media Center Pemda)	<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan dalam pengelolaan media center/portal berita daerah : kurangnya SDM yang kompeten, infrastruktur teknologi yang kurang memadai, kualitas dan akurasi konten rendah; • Optimalisasi fungsi PPID dalam pelayanan informasi, Promosi dan Branding Daerah. • Optimalisasi peran media center pemerintah daerah • Permenkominfo No. 4/2024
			Belum Optimalnya Penyusunan Konten (Produksi Konten Kreatif Daerah untuk promosi daerah)	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu penguatan SDM pengelola penyusunan konten; • Perlu pedoman/SOP, standarisasi konten; • Perlu penguatan infrastruktur pengelolaan penyusunan konten.
			Kurangnya Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu bimbingan teknis, penguatan kapasitas SDM Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik; • Perlu penambahan SDM pengelola Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik; • Perlu sinergitas SDM Pengelola Informasi Publik dengan perangkat daerah. • Pendidikan Literasi Digital bagi ASN
Urusan Statistik	Rendahnya kualitas data daerah sesuai prinsip SDI	Kualitas data belum menjadi urgensi dalam perencanaan	Kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan untuk	Lemahnya komitmen dalam mewujudkan data berkualitas



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
		pembangunan daerah	menghasilkan data daerah belum sesuai proses bisnis statistik sektoral yang ideal	Minimnya SDM di bidang statistik di Perangkat Daerah baik dari sisi kuantitas maupun kualitas
	Belum optimalnya tata kelola data pemerintah daerah sesuai tahapan penyelenggaraan SDI	lemahnya monitoring dan evaluasi ketersediaan data Perangkat Daerah	Ketersediaan data belum menjadi dasar evaluasi kinerja	Lemahnya komitmen dalam pemanfaatan data melalui <i>One Single Source of Truth</i> (lemahnya koordinasi dan kolaborasi utamanya pelaku utama SDI dalam penyelenggaraan statistik sektoral)
Kurangnya <i>awareness</i> Perangkat Daerah dalam menyampaikan data secara periodik				
Minimnya SDM pengelolaan data di Perangkat Daerah baik dari sisi kuantitas maupun kualitas				
Urusan Persandian	Belum optimalnya keamanan informasi dikarenakan pengelolaan kewanitaan informasi belum terstruktur	Pengelolaan Keamanan Informasi belum terstruktur secara optimal	Kapasitas SDM pengelola keamanan informasi masih terbatas	Dalam pengelolaan kewanitaan informasi diperlukan jabatan fungsional sandiman dan manggala informatika dan saat ini hanya ada 1 (satu) orang sandiman pengelola kewanitaan sistem informasi sehingga diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM nya
			infrastruktur keamanan informasi masih terbatas	Sertifikasi keamanan Informasi
			Belum optimalnya penerapan CSIRT	Infrastruktur Keamanan Informasi belum memenuhi standart kebutuhan sehingga untuk lebih optimal maka dibutuhkan spesifikasi yang lebih tinggi
				Fungsi koordinasi pada CSIRT (Tim Tanggap Insiden Siber) belum optimal, kurangnya kompetensi anggota CSIRT dalam implementasi kewanitaan informasi

Tantangan Pelayanan Diskominfo 5 Tahun ke Depan:

Dalam 5 tahun ke depan, tantangan pelayanan yang dihadapi Diskominfo diperkirakan akan semakin kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap layanan publik yang berkualitas dan berbasis digital. Peningkatan ekspektasi terhadap implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)



secara menyeluruh akan menuntut Diskominfo untuk mengakselerasi transformasi digital di seluruh PD, yang memerlukan investasi signifikan dalam infrastruktur, sistem, dan SDM. Isu keamanan siber akan menjadi semakin krusial dengan meningkatnya volume dan kompleksitas data pemerintah berbasis digital, serta potensi ancaman siber yang semakin canggih. Diskominfo perlu mengembangkan strategi keamanan siber yang komprehensif dan responsif untuk melindungi aset informasi pemerintah dan kepercayaan masyarakat.

Selain itu, tuntutan terhadap keterbukaan informasi publik dan partisipasi masyarakat akan semakin meningkat. Diskominfo perlu mengembangkan platform komunikasi digital yang interaktif dan inklusif, memfasilitasi akses informasi yang mudah dan cepat, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan melalui pemanfaatan teknologi. Pengelolaan data yang terintegrasi dan berkualitas juga akan menjadi kunci dalam mendukung kebijakan berbasis data (data-driven policy) dan pengambilan keputusan yang efektif. Diskominfo perlu membangun ekosistem data yang kuat, dengan standar yang jelas, interoperabilitas antar sistem, serta kemampuan analisis data yang mumpuni. Terakhir, inovasi dalam pemanfaatan teknologi emerging seperti kecerdasan buatan (AI), big data, dan internet of things (IoT) akan menjadi penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik di berbagai sektor. Diskominfo perlu memiliki visi dan strategi yang jelas dalam mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi-teknologi ini untuk memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

2.3.2. Isu Strategis

Salah satu isu strategis utama yang dihadapi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) saat ini dan akan semakin krusial dalam 5



tahun ke depan adalah akselerasi transformasi digital dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara komprehensif di seluruh lingkungan pemerintah kabupaten/kota. Tuntutan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan kualitas layanan publik mendorong setiap PD untuk mengadopsi teknologi digital dalam proses bisnisnya. Diskominfo memegang peran sentral dalam memfasilitasi transformasi ini melalui penyediaan infrastruktur TIK yang handal, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi terintegrasi, serta pendampingan dan peningkatan kapasitas SDM di bidang TIK pada seluruh PD. Keberhasilan implementasi SPBE akan sangat bergantung pada kemampuan Diskominfo dalam mengatasi tantangan interoperabilitas sistem, standarisasi data, dan integrasi layanan antar *platform*. Lebih lanjut, isu ini juga berkaitan erat dengan ketersediaan anggaran yang memadai untuk investasi teknologi dan pengembangan SDM yang berkelanjutan.

Isu strategis lainnya yang tidak kalah penting adalah penguatan keamanan siber dan perlindungan data. Dengan semakin banyaknya layanan pemerintah yang beralih ke platform digital dan meningkatnya volume data yang dikelola, risiko serangan siber dan kebocoran data menjadi semakin tinggi. Diskominfo memiliki tanggung jawab untuk membangun dan mengimplementasikan strategi keamanan siber yang kuat, termasuk pembentukan tim respons insiden siber, penerapan standar keamanan informasi, sosialisasi kesadaran keamanan siber kepada seluruh ASN, serta pemastian kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi. Kegagalan dalam mengatasi isu ini dapat berakibat fatal terhadap kepercayaan publik, kelumpuhan layanan, dan potensi kerugian finansial serta reputasi pemerintah daerah. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi keamanan siber, pengembangan SDM ahli keamanan siber, dan kerjasama dengan pihak terkait menjadi prioritas strategis bagi Diskominfo dalam 5 tahun mendatang.



Selain kedua isu di atas, optimalisasi pemanfaatan data statistik sebagai landasan pengambilan kebijakan (data-driven policy) juga menjadi isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius. Diskominfotiksan memiliki peran kunci dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data statistik sektoral yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada para pengambil keputusan di tingkat daerah. Peningkatan kualitas data, pengembangan platform visualisasi data yang mudah dipahami, serta peningkatan kapasitas analisis data bagi pengguna di seluruh PD akan menjadi fokus strategis. Pemanfaatan big data dan analitik prediktif juga berpotensi menjadi isu strategis di masa depan untuk menghasilkan insight yang lebih mendalam dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Terakhir, peningkatan kualitas diseminasi informasi publik dan interaksi dengan masyarakat melalui platform digital merupakan isu strategis yang berkelanjutan. Diskominfotiksan perlu berinovasi dalam memanfaatkan berbagai kanal komunikasi digital, termasuk media sosial, website, aplikasi mobile, dan platform interaktif lainnya, untuk menyampaikan informasi kebijakan dan program pemerintah daerah secara efektif dan menarik. Peningkatan literasi digital masyarakat, penyediaan layanan informasi yang inklusif dan aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat, serta fasilitasi partisipasi publik melalui platform digital akan menjadi fokus strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka dan partisipatif. Adapun isu KLHS Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar yang sejalan dengan isu di daerah dalam table berikut ini:



Tabel 2.7.
Isu Strategis Dinas Kominfotiksan Kab. Blitar

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Infrastruktur TI	Belum tercukupinya sarana dan prasarana TI	kesenjangan literasi digital (sebagian masyarakat belum memiliki kemampuan literasi digital untuk memanfaatkan layanan elektronik pemerintah) <i>Peran Kominfo :</i> Mengembangkan program literasi digital, pelatihan komunitas, dan sosialisasi anti-hoaks.	Percepatan transformasi digital global	Akselerasi Implementasi SPBE/Pemdigi	Belum optimalnya pelayanan publik digital daerah	Transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik Pemerataan kapasitas Literasi Digital bagi ASN
		Perlunya perbaikan sistem pemerintahan sehingga lebih efektif, efisien, serta berkelanjutan	Isu: Percepatan digitalisasi di seluruh dunia menuntut pemerintah daerah untuk segera beradaptasi dengan pelayanan publik digital yang terintegrasi.	Isu: Pemerintah pusat mendorong percepatan digitalisasi pemerintahan melalui SPBE sebagai bagian dari reformasi birokrasi tematik.	Isu: Banyak layanan publik di daerah belum terdigitalisasi atau belum terintegrasi antarsistem, sehingga menimbulkan inefisiensi	Cakupan Pelayanan Publik berbasis Informasi Digital Belum Optimal



Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
			Implikasi bagi Diskominfo: Harus mempercepat pembangunan infrastruktur TIK, layanan publik berbasis digital, dan interoperabilitas sistem pemerintah.	Implikasi untuk Diskominfo: Harus berperan sebagai koordinator pelaksanaan SPBE di daerah, menyiapkan arsitektur SPBE, dan melakukan integrasi sistem.	Implikasi untuk Diskominfo: Mendorong digitalisasi layanan dan integrasi sistem dalam kerangka SPBE serta membangun Mal Pelayanan Publik Digital.	Optimalisasi dan perluasan Ruang Internet Gratis (Free Wifi Zone) bagi masyarakat, pelajar dan UMKM
			Relevansi Global: Munculnya <i>smart governance, e-government, dan smart city</i> sebagai standar internasional dalam pelayanan publik.	Terkait dengan: Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE, dan PermenPANRB tentang Evaluasi SPBE.		Integrasi Smart City dengan Berbagai Sektor khususnya Layanan Publik, Promosi dan Branding (DPMPTSP, Pariwisata, Pendidikan dan Kesehatan)
Pengelolaan Informasi Publik	Belum tersedianya Portal Berita Daerah/Media Center Pemda					Kualitas dan kuanitas Publikasi Informasi untuk Prpmosi dan Branding Belum Optimal
Kementerian Komunikasi dan Digital telah berhasil mengidentifikasi serta mengklarifikasi sebanyak 1.923 konten hoaks, berita bohong dan informasi palsu sepanjang tahun 2024, dan	Literasi digital di masyarakat masih rendah dan perlunya pembentukan, penguatan tim anti hoax	-	Perkembangan teknologi dan isu-isu yang terus berkembang	Penguatan komunikasi dan informatika melalui pembentukan Kementerian Komunikasi dan Digital	Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah memiliki klinik hoax	Peningkatan literasi digital, pembentukan tim anti hoax, dan adopsi klinik hoax



Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
akan terus ada/berkembang pada tahun-tahun berikutnya						
Penerapan Sistem Keamanan Siber di Lingkungan Pemerintah Daerah	Pengelolaan Keamanan Informasi Belum Terstruktur Secara Optimal					Peningkatan Indeks Keamanan Informasi
Pengelolaan Aplikasi Informatika	Penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis digital yang Belum Mencapai Optimalitas	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial belum Optimal	Rendahnya integrasi dan keamanan sistem layanan digital pemerintahan di tengah tuntutan global akan tata kelola yang transparan dan efisien, yang menghambat optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi	Tata kelola pemerintahan belum optimal	Menyederhanakan prosedur administratif dan meningkatkan pelayanan publik	Rendahnya integrasi dan penerapan teknologi terbaru terkait layanan digital untuk mendukung transformasi digital pelayanan publik menuju pemerintah digital
		Tingkat kemiskinan yang disebabkan kurangnya lapangan pekerjaan serta kurangnya pelatihan	Kesenjangan infrastruktur digital dan rendahnya literasi digital, yang menghambat transformasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi dan akses masyarakat terhadap layanan publik digital.	Infrastruktur dan literasi digital rendah	Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi	Keterbatasan infrastruktur dan SDM TIK, belum terwujudnya ekosistem pemerintah digital dan rendahnya literasi digital



Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai tahapan dan prinsip Satu Data Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kualitas data daerah sesuai prinsip SDI - Belum optimalnya tata kelola data pemerintah daerah sesuai tahapan penyelenggaraan SDI 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial belum optimal - Tingkat kemiskinan masih tinggi 	Perkembangan teknologi. Teknologi akan menggantikan 40 persen pekerjaan saat ini.	<p>Isu Pemerintahan dan Regulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif - Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar <ul style="list-style-type: none"> - Belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik dan bermanfaat dengan wawasan global dan tetap berkearifan lokal melalui kolaborasi governansi - Penguatan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik 	Pemanfaatan data yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan efektif serta penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran





BAB 3

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 secara inheren terikat dengan visi dan misi Bupati Blitar yang tertuang dalam RPJMD. Visi "Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya" menjadi landasan filosofis, sementara Misi ke-3, yaitu "Meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik yang akuntabel dan bebas korupsi, bersifat melayani serta peka terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat," secara langsung diemban oleh Diskominfotiksan. Tujuan Renstra Diskominfotiksan dirumuskan untuk mendukung terwujudnya misi ini, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur TIK, pengembangan sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penyediaan akses informasi dan layanan yang mudah dan cepat. Maka tujuan renstra Diskominfotiksan adalah: Meningkatkan kualitas kinerja birokrasi dan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (elektronik) yang berorientasi pada akuntabilitas, integritas, pelayanan prima, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Adapun Visi dan Misi Bupati Blitar terpilih adalah:

Visi : **"Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya"**

Misi :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak, Sehat Jasmani dan Rohani, Inklusif, Berpendidikan yang Baik, Berdaya Saing, melalui Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Optimalisasi Potensi Generasi Muda yang Siap Menyongsong Indonesia Emas.
2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal didukung infrastruktur yang mantap, berwawasan lingkungan,



berpihak dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha.

3. Meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik yang akuntabel dan bebas korupsi, bersifat aktif melayani serta peka terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
4. Menjamin ketentraman, ketertiban, ketangguhan bencana serta kebebasan beragama dalam kehidupan bermasyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Adapun nilai-nilai visi dan misi Bupati terpilih ini diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan yang disebut dengan **Catur Dharma** yang terdiri atas :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia : pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis serta beasiswa satu desa satu sarjana;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi : penumbuhan wirausaha, pemberian bantuan sarana produksi serta pemasaran produk pertanian, dan penyediaan infrastruktur mantap yang mendukung perkembangan perekonomian;
3. Peningkatan Pelayanan Publik : penyediaan titik-titik akses internet gratis bagi Masyarakat dan mewujudkan Kabupaten Blitar bebas Rumah Tidak Layak Huni;
4. Jaminan Ketentraman Umum : dukungan fasilitas tempat ibadah dan penerangan jalan.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar merupakan perangkat daerah yang menjalankan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang mendukung **misi ke-3 yaitu meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik yang akuntabel dan bebas korupsi, bersifat melayani serta peka terhadap aspirasi dan kebutuhan Masyarakat.**



Gambar 3.7 Kerangka Logis Misi 3

Gambar 3.1 Tujuan dan Sasaran Misi 3

Sumber: Dokumen RPJMD 2025-2029 Kab.Blitar, 2025

Dalam mencapai misi ke-3, **yaitu meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik yang akuntabel dan bebas korupsi, bersifat melayani serta peka terhadap aspirasi dan kebutuhan Masyarakat**, maka Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang ditetapkan sebagai berikut:

Tujuan: Terwujudnya kualitas tata kelola dan pelayanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi, yang akan dicapai melalui sasaran strategis pembangunan daerah sebagai berikut:

Sasaran:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.

Sesuai dengan penjabaran sasaran kedua RPJMD dan indikatornya terlihat jelas bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mendukung pencapaian Tujuan ke-3 dan Sasaran ke-2 yaitu Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien, dengan indikator Indeks SPBE atau Indeks Pemerintahan Digital Kabupaten Blitar. Sedangkan terkait program Catur Dharma yang juga linier dengan RPJMD, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mendukung Catur Dharma ke-1 yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia: pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis serta beasiswa satu desa satu sarjana dan ke-3 yaitu *peningkatan pelayanan publik* yang tergambar dalam konsep program penyediaan titik-titik akses internet gratis bagi Masyarakat.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2025 - 2029, maka disusunlah tujuan dan sasaran yang menjadi dasar rujukan perumusan tujuan, sasaran dan program prioritas perangkat daerah yang dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan : Terwujudnya kualitas tata kelola dan pelayanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi.

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Outcome: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika.

Indikator: 1. Tingkat Kematangan Keterpaduan Layanan Administrasi Pemerintahan;
2. Tingkat Kematangan Keterpaduan Pelayanan Publik Digital; (*internet gratis di desa dan kelurahan*)
3. Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi. (*pengamanan informasi*)

Program Prioritas: Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

Sasaran: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.

Indikator: Indeks SPBE.

Outcome: Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN).

Indikator: Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Metadata Statistik Sektoral sesuai Standar.

Program Prioritas: Program Penyelenggaraan Statistik.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, **Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian** mempunyai peran dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran beserta Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Blitar 2025 - 2029 sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Peran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Blitar

RPJMD Kabupaten Blitar			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudnya kualitas tata kelola dan pelayanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Indeks SPBE
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien. Melalui Integrasi Sistem Layanan Publik dan Administrasi Pemerintah, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelolaan Data Sektoral serta Keamanan Informasi yang Terintegrasi	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi
		Meningkatnya efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas pelayanan publik berbasis digital sehingga terwujud sistem layanan publik dan administrasi pemerintah yang terintegrasi	Nilai Aspek Teknologi Digital
			Nilai Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah
			Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai tahapan dan prinsip Satu Data Indonesia	Indek SPBE (ditetapkan menggunakan Pemdigi)/Indek Pemdigi (Bidang Aptika)	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik

Indikator :

- Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi (KI) dengan perolehan nilai Informatif dan sangat Informatif

2. Meningkatnya Efektifitas, efisiensi, transparansi dan aksesibilitas pelayanan publik berbasis digital sehingga terwujud sistem layanan publik dan administrasi pemerintah yang terintegrasi.

Indikator :

- Tingkat kematangan aspek Teknologi Digital
- Tingkat kematangan aspek keterpaduan layanan digital pemerintah

3. Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektor sesuai tahapan dan prinsip Data Data Indonesia (SDI)

Indikator :

- Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

4. Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Indikator :

- Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar beserta target yang akan dicapai dalam periode restra disajikan dalam tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						Ket.	
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2	2		3	4	5	8	9	10	11	12	13		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien. Melalui Integrasi Sistem Layanan Publik dan Administrasi Pemerintah,	Predikat Keterbukaan Informasi Publik			Skor (skala 1-100)	85.55	85.60	85.70	85.80	85.90	86.00		
			Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi	Skor (skala 1-100)	93.00	93.20	93.50	93.80	94.00	95.00		
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelolaan Data Sektorial serta Keamanan Informasi yang Terintegrasi	Indek SPBE (ditetapkan menggunakan Pemdigi)/Indek Pemdigi	Meningkatnya efektivitas, efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas pelayanan publik berbasis digital sehingga terwujud sistem layanan publik dan administrasi pemerintah yang terintegrasi			4.38	1,71-2,01	1,71-2,01	1,91-2,3	1,91-2,3	2,01-2,44		
				Nilai Aspek Teknologi Digital (skor)	Skor (skala 0-5)								
				sumber data : penilaian Menpan RB	3,8	1,71-2,01	1,71-2,01	1,91-2,3	1,91-2,3	2,01-2,44			
				Nilai Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah (skor)	Skor (skala 0-5)								
				sumber data : penilaian Menpan RB	3,2	1,71-2,01	1,71-2,01	1,91-2,3	1,91-2,3	2,01-2,44			

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	2		3	4	5	8	9	10	11	12	13	
			Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai tahapan dan prinsip Satu Data Indonesia	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2.6-3.0	2.6-3.0	2.6-3.0	2.6-3.0	2.6-3.0	2.6-3.0	
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Indeks berkisar 0 hingga 100 Belum Siap (0-25), Kurang Siap (25-50), Cukup Siap (51-65), Siap (66-80), Sangat Siap 81-100 Rilis BSSN	(Cukup Siap) 55	(Cukup Siap) 60	(Cukup Siap) 65	(Siap) 70	(Siap) 75	(Siap) 80	Cukup Siap versi 4.2 : 75 Versi 5,0 : 55 Target diisi berdasarkan versi 5.0 yang berlaku mulai : https://bssn.go.id/indeks-kami/ Terdapat penambahan indikator dari 37 menjadi 42
		Skor SAKIP Pemerintah Daerah				69.16	70.66	72.91	75.91	77.66	80.16	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien.	Skor SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB 72,5	BB 73,5	BB 74,5	BB 75,5	BB 76,5	BB 78	



3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi untuk Mencapai Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, antara lain:

- **Perluasan dan Pengembangan Layanan Publik Berbasis Elektronik:**
 - **Identifikasi dan Prioritisasi Layanan:** Menganalisis kebutuhan masyarakat dan memprioritaskan pengembangan layanan publik yang paling banyak dibutuhkan untuk diakses secara elektronik, hingga mencapai target 50 layanan.
 - **Pengembangan Platform Layanan Terpadu:** Mengembangkan platform layanan digital yang terintegrasi dan mudah digunakan oleh masyarakat, baik melalui website, aplikasi mobile, maupun kanal lainnya.
 - **Peningkatan User Experience (UX):** Mendesain antarmuka pengguna (user interface) dan alur layanan yang intuitif, responsif, dan mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat.
- **Penguatan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):**
 - **Peningkatan Kualitas Layanan Informasi:** Meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang disediakan oleh PPID melalui berbagai kanal, baik online maupun offline, untuk mempertahankan predikat A.
 - **Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Elektronik:** Mengembangkan sistem pengelolaan dokumentasi dan arsip secara elektronik yang efektif dan efisien untuk mendukung penyediaan informasi yang akurat dan cepat.
 - **Sosialisasi dan Edukasi Layanan Informasi:** Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak atas informasi dan cara mengakses layanan informasi publik.



- **Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat:**

- **Pengembangan Standar Pelayanan Elektronik:** Menyusun dan menerapkan standar pelayanan publik berbasis elektronik yang jelas, transparan, dan terukur.
- **Implementasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Online:** Menyediakan platform pengaduan online yang mudah diakses dan responsif untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat terkait layanan publik elektronik.
- **Pengukuran Kepuasan Masyarakat Secara Berkala:** Melakukan survei kepuasan masyarakat (IKM) secara berkala terhadap layanan publik elektronik dan menindaklanjuti hasil survei untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, hingga mencapai skor 95%.

Strategi untuk Mencapai Sasaran 2: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien:

- **Penguatan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE):**

- **Pengembangan dan Integrasi Sistem:** Mempercepat pengembangan dan mengintegrasikan berbagai aplikasi dan platform layanan pemerintah daerah ke dalam kerangka SPBE yang komprehensif. Ini termasuk sistem informasi manajemen kinerja, sistem keuangan daerah, dan sistem layanan publik lainnya.
- **Peningkatan Infrastruktur TIK:** Memastikan ketersediaan infrastruktur TIK yang handal, aman, dan berkapasitas memadai untuk mendukung operasional SPBE, termasuk jaringan internet, pusat data, dan perangkat keras pendukung.
- **Standarisasi dan Interoperabilitas Data:** Menerapkan standar data dan protokol interoperabilitas antar sistem untuk memastikan kelancaran pertukaran informasi dan integrasi layanan.

- **Peningkatan Kapasitas SDM:** Melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN dalam pengelolaan dan pemanfaatan SPBE, termasuk aspek keamanan siber dan tata kelola TIK.
- **Pengawasan dan Evaluasi SPBE:** Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi SPBE untuk mengidentifikasi kendala dan melakukan perbaikan berkelanjutan, yang akan berkontribusi pada peningkatan Indeks SPBE.
- **Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Berbasis Elektronik:**
 - **Transparansi dan Akses Informasi:** Meningkatkan transparansi kinerja pemerintah dan menyediakan akses informasi publik secara elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk melalui pengembangan portal informasi publik yang komprehensif.
 - **Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal:** Memanfaatkan sistem elektronik untuk mendukung pengawasan kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan, serta memfasilitasi pelaporan dugaan pelanggaran.
 - **Pencegahan Korupsi Berbasis Teknologi:** Mengimplementasikan sistem yang meminimalkan potensi korupsi, seperti e-procurement, e-budgeting, dan sistem pembayaran elektronik.
 - **Peningkatan Akuntabilitas Kinerja:** Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel, yang berkontribusi pada peningkatan skor Reformasi Birokrasi.

Strategi-strategi ini bersifat umum dan perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam program dan kegiatan yang lebih spesifik, dengan alokasi anggaran dan penanggung jawab yang jelas dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah. Selain itu, keberhasilan implementasi strategi ini akan sangat bergantung pada koordinasi dan



kerjasama yang baik antar PD, partisipasi aktif masyarakat, serta dukungan dari pimpinan daerah.

3.4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten 2025–2030 disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis digital. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat peran Kominfotiksan sebagai motor penggerak transformasi digital daerah yang inklusif dan berdaya saing, sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Blitar, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan agenda nasional *Digital Government Indonesia 2045*. Adapun Penahapan Renstra Dinas Kominfotiksan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3.
Tahapan Renstra Renstra Dinas Kominfotiksan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Konsolidasi Perencanaan Pembangunan Daerah: Penataan sistem, sinkronisasi kebijakan Pusat-Provinsi-Kabupaten, serta penyusunan dasar pelaksanaan yang selaras dengan RPJMD 2025-2029.	Penguatan Pondasi Transformasi Digital dan Infrastruktur Pelayanan Publik: Fokus pada perluasan akses dan peningkatan daya saing daerah berbasis digital dan inovasi.	Percepatan Integrasi Layanan Digital: Pembangunan sistem terpadu dan kolaborasi lintas sektor.	Pemantapan Kinerja dan Optimalisasi Layanan Publik: Fokus pada pemantapan kinerja pemerintah di bidang TIK dan peningkatan pelayanan masyarakat berbasis teknologi.	Kemandirian dan Keberlanjutan Transformasi Digital Daerah: Arah kebijakan difokuskan pada keberlanjutan dan daya saing global.

Secara umum, arah kebijakan Dinas Kominfotiksan Kabupaten difokuskan pada empat bidang utama, yaitu **Informasi dan Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, Statistik, Persandian dan Keamanan Infromasi**. Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Dinas Kominfotiksan dimuat dalam table berikut ini:

Tabel 3.4.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI (RPJMD)	Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya		
MISI (RPJMD)	<i>Contoh:</i> Misi 3 : Meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik yang akuntabel dan bebas korupsi, bersifat aktif melayani serta peka terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien. Melalui Integrasi Sistem Layanan Publik dan Administrasi Pemerintah, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelolaan Data Sektoral serta Keamanan Informasi yang Terintegrasi	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai tahapan dan prinsip Satu Data Indonesia	Penguatan kebijakan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah	Mendorong dilakukannya reviu atas kebijakan <i>existing</i> Satu Data Indonesia di Kabupaten Blitar dan penyelenggaraan statistik sektoral daerah
			Mendorong disusunnya Rencana Aksi Satu Data Indonesia Daerah beserta Standar operasional Prosedur (SOP) yang diperlukan
			Penguatan kolaborasi dan koordinasi Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral/Tim Penggerak Satu Data Indonesia Kabupaten Blitar
			Mendorong intensifikasi dan optimalisasi Forum Data oleh Koordinator Forum Data Daerah
		Penguatan kapasitas dan kompetensi SDM statistik dan tata kelola data	Intensifikasi pembinaan statistik sektoral melalui pendampingan kegiatan statistik sektoral Perangkat Daerah kolaboratif bersama pembina data
			Penyelenggaraan pelatihan teknis dan manajerial tentang Satu Data Indonesia dan Penyelenggaraan Statistik Sektoral untuk ASN
			Penguatan peran walidata pendukung Perangkat Daerah melalui Forum
			Fasilitasi pengembangan jabatan fungsional statistisi

VISI (RPJMD)	Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya		
MISI (RPJMD)	Contoh: Misi 3 : Meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik yang akuntabel dan bebas korupsi, bersifat aktif melayani serta peka terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Monitoring dan evaluasi ketersediaan data Perangkat Daerah secara berkala	Mendorong sinkronisasi proses perencanaan data dan perencanaan kegiatan statistik sektoral menjadi bagian dari tahap awal perencanaan dan penganggaran Kabupaten Blitar
			Mendorong penilaian kinerja berbasis ketersediaan data
			Optimalisasi Portal Data sebagai media dan sarana penyebaran dan pemanfaatan data
		Mendorong penyediaan data mikro daerah terintegrasi sebagai <i>backbone</i> basis data sasaran program prioritas nasional dan daerah	Pendampingan dan pembinaan kegiatan statistik sektoral prioritas terkait
			Mendorong pembangunan/pengembangan sistem penyediaan <i>backbone</i> berbasis data kependudukan yang terintegrasi
			Mendorong pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk pertukaran data
			Mendorong kebijakan Perlindungan Data Pribadi
			Sinkronisasi data sektoral agregat dan data mikro
		Mendorong pemanfaatan <i>Big Data</i> dalam penyelenggaraan statistik sektoral daerah	Penyusunan kebijakan terkait pemanfaatan <i>big data</i> dalam penyelenggaraan statistik sektoral daerah
			Pendampingan dan pembinaan kegiatan statistik sektoral terkait
			Mendorong peningkatan SDM dalam pemanfaatan <i>Big Data</i>
	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah	Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Keamanan Informasi	Menyusun dokumen kebijakan keamanan informasi sesuai standart (misalnya ISO/IEC 27001 atau Permenkominfo no 4/2016)
			Menetapkan Peraturan Kepala Daerah atau SK terkait



VISI (RPJMD)	Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya		
MISI (RPJMD)	Contoh: Misi 3 : Meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik yang akuntabel dan bebas korupsi, bersifat aktif melayani serta peka terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			penetapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)
			Meningkatkan efektifitas kinerja tim CSIRT daerah
		Implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	Meningkatkan persiapan assesment lanjutan menggunakan tools Indeks KAMI
			Menyusun rencana kerja peningkatan keamanan informasi berdasarkan GAP anlysis
			Menetapkan prosedur : pengelolaan risiko keamanan informasi, manajemen akses dan kontrol teknis, penanganan insiden siber, backup dan pemulihan data
		Meningkatkan Kapasitas dan Kesadaran SDM	Mengadakan pelatihan dan sosialisasi keamanan informasi untuk seluruh pegawai
			Melakukan simulasi penanganan insiden siber secara berkala
			Memberikan sertifikasi profesional untuk personel teknis (ISO 27001 Lead Implementer, CEH, CISA,dsb)
		Audit dan Monitoring Kepatuhan	Melaksanakan audit internal berkala terhadap kebijakan dan sistem keamanan informasi
			Menyusun dan mengevaluasi laporan keamanan informasi (bulanan/triwulan)
			Mengintegrasikan pengawasan keamanan informasi ke dalam sistem pengendalian internal daerah (APIP)
		Kolaborasi dan Koordinasi dengan Lembaga Terkait	Bekerjasama dengan BSSN (penguatan kapasitas, optimalisasi Tim CSIRT daerah, konsultasi teknis dan legal)
			Mengikuti Program Nasional (evaluasi indeks KAMI, Bimtek TIK dan keamanan siber, program smart city atau SDI)

VISI (RPJMD)	Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya		
MISI (RPJMD)	Contoh: Misi 3 : Meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik yang akuntabel dan bebas korupsi, bersifat aktif melayani serta peka terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatkan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik - Meningkatkan publikasi melalui Penyusunan Konten yang baik dan terupdate, meningkatkan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat, menjalin Relasi Media - meningkatkan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, media center sebagai pusat informasi masyarakat, pers release pemerintah daerah - melakukan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik - meningkatkan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
		Meningkatkan Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik - Meningkatkan pengelolaan kanal layanan pengaduan - Meningkatkan kolaborasi penyelesaian layanan pengaduan bersamal PD dan instansi terkait - meningkatkan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
	Meningkatnya efektivitas, efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas pelayanan publik berbasis digital sehingga terwujud sistem layanan publik dan administrasi pemerintah yang terintegrasi	Mengembangkan infrastruktur, teknologi terbaru dan ekosistem digital yang kuat untuk mendukung layanan publik terintegrasi.	<ul style="list-style-type: none"> Investasi akses internet cepat dengan memperluas jaringan internet berkecepatan tinggi ke daerah blankspot untuk memastikan akses merata Pembangunan platform digital dengan mengembangkan platform aman yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu portal baik layanan publik maupun administrasi pemerintah Penerapan Teknologi terbaru, Penguatan keamanan dan peningkatan performa sistem dengan Menerapkan langkah-langkah seperti enkripsi, bigdata, AI, audit rutin untuk melindungi data dan informasi

VISI (RPJMD)	Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya		
MISI (RPJMD)	Contoh: Misi 3 : Meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik yang akuntabel dan bebas korupsi, bersifat aktif melayani serta peka terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Mengintegrasikan dan mengelola data dan layanan secara optimal di seluruh instansi pemerintah.	<p>Arsitektur data terpadu dengan membuat sistem data terintegrasi yang memungkinkan instansi berbagi dan mengakses data dengan baik</p> <p>Protokol berbagi data aman dengan Menetapkan standar dan mekanisme untuk interoperabilitas antar sistem pemerintah</p>
			Regulasi privasi data dengan Memberlakukan aturan ketat untuk melindungi informasi data pribadi dan membangun kepercayaan publik
		Merancang layanan digital inovatif yang ramah pengguna dan mudah diakses.	<p>Riset pengguna dengan Melakukan studi kebutuhan warga dan memanfaatkan umpan balik untuk merancang layanan yang intuitif</p> <p>Akses multi-saluran dengan Menyediakan layanan melalui berbagai kanal (web, aplikasi mobile, kios, teknologi imersif) sesuai preferensi pengguna</p> <p>Inklusivitas layanan dengan Menawarkan dukungan multibahasa dan fasilitas bagi penyandang disabilitas</p>
		Menetapkan kerangka tata kelola untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam layanan digital.	<p>Standar layanan digital dengan Menetapkan pedoman untuk kualitas, keamanan, dan kinerja layanan digital</p> <p>Unit pengelola sentral dengan Membentuk membentuk tim terpusat untuk mengkoordinasikan inisiatif transformasi digital lintas instansi</p> <p>Menetapkan indikator kinerja kunci (KPI) untuk mengukur capaian layanan serta melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan</p>
		Meningkatkan kapasitas pemerintah dan melibatkan pentahelix dalam perjalanan	Pelatihan pegawai dengan Meluncurkan program pelatihan keterampilan digital bagi staf pemerintah untuk mendukung inovasi dengan teknologi terbaru



VISI (RPJMD)	Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya		
MISI (RPJMD)	Contoh: Misi 3 : Meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik yang akuntabel dan bebas korupsi, bersifat aktif melayani serta peka terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		transformasi digital.	Literasi digital masyarakat dengan Meningkatkan pemahaman warga tentang layanan digital melalui kampanye edukasi Keterlibatan pentahelix dengan Membuka platform dan forum seperti portal umpan balik dan lokakarya desain untuk melibatkan publik dalam perbaikan layanan

Arah Kebijakan untuk Mencapai Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik:

- **Perluasan Cakupan dan Jenis Layanan Digital:** Secara bertahap mentransformasikan layanan publik konvensional menjadi layanan berbasis elektronik (online) yang mudah diakses, cepat, dan terintegrasi.
- **Standarisasi dan Optimalisasi Proses Bisnis Layanan:** Melakukan re-engineering proses bisnis layanan publik untuk menghilangkan inefisiensi dan menyederhanakan alur layanan berbasis elektronik.
- **Penguatan Kelembagaan PPID dan Layanan Informasi:** Meningkatkan kapasitas dan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta mengembangkan sistem dan mekanisme layanan informasi publik yang efektif dan responsif.
- **Peningkatan Kualitas Interaksi dan Partisipasi Masyarakat:** Menyediakan platform digital yang interaktif untuk menampung aspirasi, masukan, dan pengaduan masyarakat terkait layanan publik, serta menindaklanjutinya secara efektif.
- **Pengembangan Budaya Pelayanan Prima Berbasis Digital:** Mendorong perubahan mindset dan perilaku ASN untuk memberikan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi.

Arah Kebijakan untuk Mencapai Sasaran 2: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien:

- **Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan:** Mendorong dan memfasilitasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (PD) untuk mengadopsi sistem dan aplikasi berbasis elektronik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja.
- **Penguatan Infrastruktur dan Ekosistem SPBE:** Membangun dan memelihara infrastruktur TIK yang terintegrasi, aman, dan andal sebagai fondasi utama implementasi SPBE di seluruh lingkup pemerintah daerah.
- **Peningkatan Kompetensi SDM SPBE:** Melakukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang TIK bagi seluruh ASN, khususnya yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sistem elektronik pemerintahan.
- **Implementasi Tata Kelola Keamanan Informasi:** Menerapkan standar dan prosedur keamanan informasi yang ketat untuk melindungi aset digital pemerintah dan data masyarakat dari berbagai ancaman siber.
- **Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Digital:** Mendorong keterbukaan informasi publik melalui platform digital dan membangun mekanisme akuntabilitas kinerja yang dapat diakses dan dipantau secara elektronik oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, arah kebijakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra 2025-2029 akan berfokus pada **transformasi digital yang holistik**, mencakup aspek tata kelola pemerintahan, infrastruktur TIK, sumber daya manusia, keamanan informasi, transparansi, serta inovasi dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini akan diimplementasikan secara bertahap dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.





BAB 4

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian mempunyai 5 program dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berisikan kegiatan dan sub kegiatan rutin seperti perencanaan, evaluasi kinerja, gaji, pemeliharaan sarpras dan pelaksanaan penunjang kinerja ASN.
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik berisikan kegiatan yang berkaitan dengan hubungan Masyarakat dengan pimpinan daerah, penyebarluasan informasi dan sarana layanan publik berupa pelayanan informasi yang diperlukan oleh Masyarakat umum.
3. Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika berisikan 2 kegiatan yang berfokus pada infrastruktur internet dan e-government berupa layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi dan layanan publik dan pemerintah lainnya.
4. Program Penyelenggaran Statistik Sektorial berisikan kegiatan yang menyajikan data dan informasi Pembangunan kabupaten Blitar.
5. Program Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi berisikan kegiatan yang berfokus pada kebijakan dan aturan dalam mengamankan informasi dan menggunakan internet yang tepat guna.

4.2. Uraian Kegiatan

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian saat ini mempunyai 12 Kegiatan dari 5 program diatas yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah



4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
8. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
9. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota
10. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
11. Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
12. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4.3. Uraian Sub Kegiatan

Ada 34 Sub Kegiatan dalam rencana kinerja Dinas Kominfotiksan, yang secara keseluruhan mendukung target tujuan dan sasaran Dinas. Adapun Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dimuat dalam table berikut ini:

Tabel 4.1.
Rumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya capaian SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun sesuai dengan Peraturan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
									Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun sesuai dengan Peraturan	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										Tersusunnya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah



Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Tersedianya Data statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Perangkat	Penyelenggaraan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Jumlah Data statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
						Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
									Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD



Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Tersedianya dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
						Tercapainya Kecukupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kecukupan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya bahan bacaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
									Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
									Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
									Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Pendanaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
									Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
						Terlaksananya pemenuhan pengadaan barang milik daerah yang berfungsi dengan baik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kecukupan sarana dan prasarana sesuai standar dan berfungsi dengan baik	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan



Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Tercapainya kecukupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase kecukupan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
									Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
									Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan



Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang berfungsi dengan baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi baik	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
									Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
						Terpenuhinya kecukupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kecukupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan



Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi	- Terwujudnya badan publik dengan kategori informati; - Tercapainya nilai maksimal tingkat kematangan layanan pengaduan publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemda survey	- Tersedianya Akses Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik; - Tersedianya akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	Terlaksananya Relasi Media	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media



Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo
									Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan
									Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah



Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pengelolaan Media Komunikasi	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis
									Terlaksananya Penyusunan Konten	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik
									Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan



<p>Meningkatnya efektivitas, efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas pelayanan publik berbasis digital sehingga terwujud sistem layanan publik dan administrasi pemerintah yang terintegrasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Aspek Teknologi Digital; - Nilai Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah ah 	<p>Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah karena pelayanan publik yang cepat, transparan, dan mudah diakses; Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan publik akibat kemudahan akses melalui platform digital; Meningkatkan efisiensi birokrasi dengan berkurangnya biaya operasional dan waktu pelayanan manual; Meningkatkan daya saing daerah karena penerapan teknologi digital yang mendukung kemudahan berusaha dan</p>	<p>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Kematangan Keterpaduan Layanan Administrasi Pemerintahan; - Tingkat Kematangan Keterpaduan Pelayanan Publik Digital 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah aplikasi/layanan digital yang dikembangkan ; 2. Sistem platform terintegrasi untuk layanan publik; 3. Laporan hasil uji coba dan evaluasi aplikasi; 4. Pelatihan penggunaan aplikasi/layanan digital; 5. Panduan penggunaan aplikasi; 6. Sertifikasi hak cipta terkait pengembangan aplikasi/layanan digital; 7. Pembaruan dan pemeliharaan aplikasi/layanan digital; 	<p>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase layanan publik yang telah terintegrasi ke dalam satu portal; - Jumlah aplikasi atau layanan digital yang dikembangkan atau ditingkatkan; - Tingkat adopsi layanan digital oleh aparatur pemerintah; - Persentase layanan digital yang memenuhi standar manajemen layanan digital; - Persentase layanan digital yang memiliki hak cipta; - Waktu rata-rata penyelesaian gangguan teknis sistem layanan digital; - Jumlah pelatihan atau sosialisasi layanan digital untuk aparatur dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi atau modul layanan digital yang dikembangkan ; - Dokumen perencanaan dan evaluasi layanan digital; - Sistem integrasi data antar layanan digital; - Sertifikasi hak cipta pengembangan layanan digital; - Panduan atau SOP penggunaan layanan digital; - Laporan hasil pelatihan atau sosialisasi layanan digital; - Pembaruan perangkat lunak atau infrastruktur layanan digital; - Dashboard monitoring kinerja layanan digital; 	<p>Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa</p>	<p>Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa</p>
---	---	--	--	--	---	--	--	--	---	---



Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			investasi; Meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik melalui sistem digital yang mencatat setiap transaksi dan interaksi layanan secara transparan;				Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	masyarakat; - Persentase anggaran kegiatan yang terserap secara efektif;		Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
										Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional



Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										<p>Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE</p> <p>Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE</p>	<p>Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE</p> <p>Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE</p>



Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
										Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas
										Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah
										Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah start-up digital yang dibina di wilayah kabupaten/kota yang sudah memiliki



Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											purwarupa produk
										Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM	Persentase tingkat adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah Kabupaten Blitar
										Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital	jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital
										Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas



Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional
										Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
										Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
										Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali



Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
										Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas
	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai tahapan dan prinsip Satu Data Indonesia	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standart	Tersedianya data statistik sektoral sesuai standarisasi	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standart	Tersedianya data statistik sektoral sesuai standarisasi (yang dihasilkan dari kegiatan statistik sektoral yang sesuai dengan tahapan proses bisnis statistik)	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik



Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk
										Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.
										Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik
										Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral



Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Meningkatnya keamanan siber dan sandi di lingkungan pemerintah daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN DAN PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Indeks KAMI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Tersedianya Dokumen Kebijakan Keamanan Informasi (Kebijakan SMKI)	Tersedianya Dokumen Kebijakan Keamanan Informasi (Kebijakan SMKI)	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
										Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian
										Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar,



Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program	Indikator Program	Output	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Output	Subkegiatan	Indikator
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian
							Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Sistem Elektronik yang telah menerapkan prinsip Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	Tersedianya SOP penanganan insiden, manajemen risiko, back up,dll	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.



4.4. Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan, Serta Sub Kegiatan Prioritas Pendukung Program Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada pada RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Bappeda ditentukanlah program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda. Adapun rincian program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan target-targetnya serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi Bupati Blitar.

4.4.1. Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif

Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada berikut ini:

Tabel 4.2.

Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Sat ua n	DO/ Formulasi Perhitungan/Referen si Sumber Data	Basel ine Pere ncan aan (202 4)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Perangkat Daerah Pengamp u Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)			Tar get	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel , Efektif dan Efisien. Melalui Integrasi Sistem Layanan Publik dan Administrasi Pemerintah, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelolaan Data Sektoral serta Keamanan Informasi yang Terintegrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN TAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh APIP	69	BB 72.5	4,870,12 9,684.00	BB 73.5	5,322,8 30,981. 00	BB 74.5	5,376, 059,2 90.65	BB 75.5	5,429,8 19,833. 55	BB 76.5	5,484 ,118, 082.3 9	BB 78	5,53 8,95 9,23 6.21	BB 78	32,02 1,917, 107.8 0	PD Pengamp u urusan komunika si dan informatika	KABUP ATEN BLITAR
		01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun sesuai dengan Peraturan	Persen	Definisi Operasional : penyelesaian dokumen- dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja pada perangkat daerah Formulasi Perhitungan: Jumlah dokumen yang diselesaikan ----- X 100 jumlah dokumen yang ditargetkan Sumber Data: Kominfo	100	10 0	117.747. 284,00	10 0	51.132. 647,85	100	51.55 8.474, 33	10 0	51.988. 558,67	100	52.42 2.944 ,66	100	52.8 61.6 73,8 9	100	377.7 11.61 3,40	PD Pengampu urusan komunika si dan informatika	KABUP ATEN BLITAR



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Sat ua n	DO/ Formulasi Perhitungan/ Referen si Sumber Data	Basel ine Pere ncaan (202 4)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										Perangkat Daerah Pengamp u Urusan	Lokasi				
								2025		2026		2027		2028		2029				2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)			Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)
		01.2. 01.00 01	Penyusun an Dokumen Perencana an Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Do ku me n	Definisi Operasional : dokumen yang berisi rencana dan strategi yang disusun oleh suatu organisasi atau pemerintah untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu yang ditentukan. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: Kominfo	3	3	35,437,88 4.00	3	13,000, 000.00	3	13,00 0,000. 00	3	13,000, 000.00	3	13,00 0,000. 00	3	13,0 00,0 00.0 0	3	100,43 7,884. 00	PD Pengampu urusan komunika si dan informatik a	KABUP ATEN BLITAR
		01.2. 01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	La por an	Definisi Operasional : proses penilaian yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana perangkat daerah telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan, serta menilai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang diamatkan. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: kominfo	4	4	82,309,40 0.00	4	29,582, 647.85	4	30,00 8,474. 33	4	30,438, 558.67	4	30,87 2,944. 66	4	31,3 11,6 73.8 5	4	234,52 3,699. 36	PD Pengampu urusan komunika si dan informatik a	KABUP ATEN BLITAR
		01.2. 01.00 8	Penyeleng garaan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Hasil Penyelengga raan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	Do ku me n	Definisi Operasional : Dokumen hasil penyelenggaraan wali data pendukung statistik sektoral daerah dapat berupa laporan/berita acara/surat yang merupakan hasil dari koordinasi dan konsultasi dengan walidata, dan membantu walidata mengumpulkan, memeriksa, dan mengolah data pada PD.	1	1	0	1	1,050,0 00.00	1	1,050, 000.0 0	1	1,050,0 00.00	1	1,050, 000.0 0	1	1,05 0,00 0.00	1	5,250, 000.00	PD Pengampu urusan komunika si dan informatik a	KABUP ATEN BLITAR



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Sat ua n	DO/ Formulasi Perhitungan/ Referen si Sumber Data	Basel ine Pere ncaan (202 4)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Perangkat Daerah Pengamp u Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)			Tar get	Pagu (Rp)
		01.2. 01.00 9	Penyeleng garaan Pelaksana an Pengumpu lan Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral Derah yang telah dikumpulka n dan diperiksa lingkup perangkat daerah	Da ta	Definisi Operasional : proses pengumpulan dasesuai dengan standar data, dafr data yang telah ditentukan dalam forum satu data pada tahap perencanaan pengumpulan data	53	53	0	53	7,500,0 00.00	53	7,500, 000.0 0	53	7,500,0 00.00	53	7,500, 000.0 0	53	7,50 0,00 0.00	53	37,500 ,000.0 0	PD Pengampu urusan komunika si dan informatik a	KABUP ATEN BLITAR
		01.2. 02	Administr asi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	Per se n	Definisi Operasional : kecukupan administrasi keuangan yang dilakukan oleh perangkat daerah sesuai dengan standar, peraturan yang berlaku, dan mendukung pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel. Formulasi Perhitungan: jumlah administrasi keuangan yang tercukupi ----- X 100 jumlah administrasi keuangan yang dibutuhkan Sumber Data: Kominfo	100	10 0	3,307,01 3,084.00	10 0	4,258,2 64,784. 80	100	4,300, 847,4 32.52	10 0	4,343,8 55,866. 84	100	4,387 ,294, 465.9 1	100	4,43 1,16 7,38 8.97	100	25,02 8,443, 023.0 4	PD Pengampu urusan komunika si dan informatik a	KABUP ATEN BLITAR
		01.2. 02.00 01	Penyedia an Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Or an g/ Bu lan	Definisi Operasional : pengelolaan, perencanaan, dan pengalokasian dana yang dilakukan untuk membayar gaji dan tunjangan bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Formulasi Perhitungan: cukup jelas	28	28	3,267,649 ,134.00	37	4,228,9 00,834. 80	49	4,271, 483,4 82.52	50	4,314,4 91,916. 84	50	4,357, 930,5 15.91	50	4,40 1,80 3,43 8.97	50	24,842 ,259,3 23.04	PD Pengampu urusan komunika si dan informatik a	KABUP ATEN BLITAR



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Sat ua n	DO/ Formulasi Perhitungan/ Referen si Sumber Data	Basel ine Pere ncanaan (202 4)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Perangkat Daerah Pengamp u Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)			Targ et	Pagu (Rp)
						Sumber Data: Kominfo																	
		01.2. 02.00 02	Penyediaa n Administ rasi Pelaksana an Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Do ku me n	Definisi Operasional : penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dilakukan untuk membayar biaya perjalanan dinas dalam kota dan menghadiri rapat- rapat dalam kota serta pengadaan pakaian batik wajib OPD. Formulasi Perhitungan :cukup jelas. Sumber Data Dinas Kominfo	1	1	38,000,00 0.00	2	28,000, 000.00	2	28,00 0,000. 00	2	28,000, 000.00	2	28,00 0,000. 00	2	28,00 00,0 00.0 0	2	178,00 0,000. 00	PD Pengampu urusan komunika si dan informatik a	KABUP ATEN BLITAR
		01.2. 02.00 05	Koordinasi dan Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	La por an	Definisi Operasional : proses pengelolaan, pengolahan, dan penyusunan laporan keuangan tahunan oleh Perangkat Daerah yang melibatkan koordinasi antar unit atau bagian yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: Kominfo	7	7	1,363,950 .00	7	1,363,9 50.00	7	1,363, 950.0 0	7	1,363,9 50.00	7	1,363, 950.0 0	7	1,36 3,95 0.00	7	8,183, 700.00	PD Pengampu urusan komunika si dan informatik a	KABUP ATEN BLITAR



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Sat ua n	DO/ Formulasi Perhitungan/Referen si Sumber Data	Basel ine Pere ncan aan (202 4)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										Perangkat Daerah Pengamp u Urusan	Lokasi				
								2025		2026		2027		2028		2029				2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)			Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)
		01.2. 05	Administ rasi Kepegawa ian Perangkat Daerah	Persentase kecukupan Administ rasi Kepegawa ian Perang kat Daerah	Per se nt ase	Definisi Operasional : kecukupan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah dalam mendukung pengelolaan sumber daya manusia (SDM) agar efektif dan efisien di lingkungan pemerintahan daerah Formulasi Perhitungan: jumlah layanan administrasi kepegawaian yan tercukupi ----- X 100 jumlah layanan administrasi kepegawaian yang dibutuhkan Sumber Data: Kominfo	100	10 0	85,970,0 00.00	10 0	90,488, 126.68	100	91,39 3,007. 94	10 0	92,306, 937.17	100	93,23 0,007 .40	100	94,1 62,3 07.0 2	100	547,5 50,38 6.20	PD Pengampu urusan komunika si dan informatik a	KABUP ATEN BLITAR
		01.2. 05.00 9	Pendidika n dan Pelatihan Pegawai Berdasark an Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Or an g	Definisi Operasional : proses peningkatan kompetensi aparatur melalui kegiatan belajar terstruktur yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing pegawai, guna mendukung peningkatan kinerja, profesionalisme, dan pencapaian tujuan organisasi. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: Kominfo	28	28	85,970,00 0.00	37	90,488, 126.68	37	91,39 3,007. 94	37	92,306, 937.17	37	93,23 0,007. 40	37	94,1 62,3 07.0 2	37	547,55 0,386. 20	PD Pengampu urusan komunika si dan informatik a	KABUP ATEN BLITAR



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Sat ua n	DO/ Formulasi Perhitungan/ Referen si Sumber Data	Basel ine Pere ncana an (202 4)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										Perangkat Daerah Pengamp u Urusan	Lokasi				
								2025		2026		2027		2028		2029				2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)			Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)
		01.2. 06	Administ rasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kecukupan layanan Administ rasi Umum Perangkat Daerah	Per se n	Definisi Operasional : kecukupan layanan administrasi umum perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di lingkungan pemerintahan daerah Formulasi Perhitungan: jumlah Iketersediaan administrasi umum ----- X 100 jumlah layanan administrasi umum yang dibutuhkan Sumber Data: Kominfo	100	10 0	286,588, 140.00	10 0	273,56 0,041.9 9	100	276,3 81,14 2.40	10 0	279,23 0,451.1 8	100	282,1 08,25 8.37	100	285, 014, 839. 52	100	1,682, 882,8 73.46	PD Pengamp u urusan komunika si dan informati ka	KABUP ATEN BLITAR
		01.2. 06.00 01	Penyediaa n Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pa ket	Definisi Operasional : kegiatan pengadaan dan pemasangan perangkat kelistrikan serta sistem penerangan dan perlengkapan lainnya, yang diperlukan untuk mendukung fungsi operasional kantor secara optimal, aman, dan efisien. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: Kominfo	10	10	4,317,500 .00	10	4,513,7 60.67	10	4,558, 898.2 8	10	4,604,4 87.22	10	4,650, 532.1 5	10	4,69 7,03 7.43	10	27,342 ,215.7 5	PD Pengampu urusan komunika si dan informatik a	KABUP ATEN BLITAR



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Sat ua n	DO/ Formulasi Perhitungan/ Referen si Sumber Data	Basel ine Pere ncaan (202 4)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Perangkat Daerah Pengamp u Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)			Tar get	Pagu (Rp)
		01.2. 06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pa ket	Definisi Operasional : proses pengadaan, pengelolaan dan distribusi semua jenis peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional kantor. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: Kominfo	14	14	21,827,30 0.00	14	21,722, 473.23	14	21,93 9,697. 97	14	22,159, 094.74	15	22,38 0,685. 89	15	22,6 04,4 92.6 4	15	132,63 3,744. 47	PD Pengampu urusan komunika si dan informatik a	KABUP ATEN BLITAR
		01.2. 06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pa ket	Definisi Operasional : kegiatan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, distribusi dan penggunaan bahan logistik yang diperlukan untuk mendukung kelancaran aktivitas administrasi dan operasional kantor. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: Kominfo	6	6	101,030,8 00.00	6	92,084, 844.82	6	93,08 0,693. 27	6	94,086, 499.27	6	95,10 2,365. 20	6	96,1 28,3 88.3 5	6	571,51 3,590. 91	PD Pengampu urusan komunika si dan informatik a	KABUP ATEN BLITAR



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Sat ua n	DO/ Formulasi Perhitungan/ Referen si Sumber Data	Basel ine Pere ncana an (202 4)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										Perangkat Daerah Pengamp u Urusan	Lokasi				
								2025		2026		2027		2028		2029				2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)			Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)
		01.2. 06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	Pa ket	Definisi Operasional : kegiatan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pengelolaan jenis barang cetakan dan penggandaan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan layanan kantor Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: Kominfo	8	8	28,913,94 0.00	8	27,725, 224.28	8	28,01 2,976. 53	8	28,303, 606.02	8	28,59 7,142. 35	8	28,8 93,6 13.6 3	8	170,44 6,502. 81	PD Pengampu urusan komunika si dan informatik a	KABUP ATEN BLITAR
		01.2. 06.00 09	Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	La por an	Definisi Operasional : kegiatan perencanaan, persiapan, pelaksanaan , dokumentasi dan evaluasi rapat yang diselenggarakan oleh atau antar instansi untuk tujuan koordinasi, penyelesaian masalah, konsultasi dan lainnya yang terkait program, kegiatan serta kebijakan pemerintah. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: Kominfo	1	1	128,748,6 00.00	1	125,538 ,968.69	1	126,7 94,35 8.37	1	128,062 ,300.77	1	129,3 42,92 4.97	1	130, 636, 353. 59	1	769,12 3,506. 39	PD Pengampu urusan komunika si dan informatik a	KABUP ATEN BLITAR
		01.2. 06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang Disediakan	Do ku me n	Definisi Operasional : kegiatan penyediaan bahan bacaan untuk mengetahui informasi Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: Kominfo	1	1	1,750,000 .00	1	1,974,7 70.29	1	1,994, 518.0 0	1	2,014,4 63.16	1	2,034, 607.8 1	1	2,05 4,95 3.88	1	11,823 ,313.1 4	PD Pengampu urusan komunika si dan informatik a	KABUP ATEN BLITAR



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Sat ua n	DO/ Formulasi Perhitungan/Referen si Sumber Data	Basel ine Pere ncan aan (202 4)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										Perangkat Daerah Pengamp u Urusan	Lokasi				
								2025		2026		2027		2028		2029				2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)			Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)
		01.2. 07	Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah	Persentase kecukupan sarana dan prasarana sesuai standar dan berfungsi dengan baik	Per se nt ase	Definisi Operasional : kecukupan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perangkat daerah yang memenuhi standar yang ditetapkan dan berfungsi dengan baik dalam mendukung operasional pemerintahan Formulasi Perhitungan: jumlah sarana dan prasarana yang tercukupi ----- x100 jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan Sumber Data: Kominfo	100	10 0	27,008,5 00.00	31,936, 985.89	100	32,25 6,355. 74	10 0	32,578, 919.00	100	32,90 4,708 .49	100	33,2 33,7 55.4 2	100	189,9 19,22 4.54	PD Pengampu urusan komunika si dan informatik a	KABUP ATEN BLITAR	
		01.2. 07.00 11	Pengadaa n Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Un it	Definisi Operasional : Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: Kominfo	14	14	27,008,50 0.00	31,936, 985.89	14	32,25 6,355. 74	14	32,578, 919.00	14	32,90 4,708. 49	14	33,2 33,7 55.4 2	14	189,91 9,224. 54	PD Pengampu urusan komunika si dan informatik a	KABUP ATEN BLITAR	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Sat ua n	DO/ Formulasi Perhitungan/ Referen si Sumber Data	Basel ine Pere ncana an (202 4)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										Perangkat Daerah Pengamp u Urusan	Lokasi				
								2025		2026		2027		2028		2029				2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)			Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)
		01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kecukupan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Per se nt ase	Definisi Operasional : kecukupan penyediaan jasa yang mendukung urusan pemerintahan daerah untuk kebutuhan operasional pemerintahan. Formulasi Perhitungan: jumlah jasa penunjang yang tercukupi ----- X 100 jumlah jasa penunjang yang dibutuhkan Sumber Data: Kominfo	100	100	761,344,816.00	100	431,149,309.46	100	435,460,802.54	100	439,815,406.52	100	444,213,564.67	100	448,655,698.13	100	2,960,639,597.33	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika	KABUP ATEN BLITAR
		01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	La por an	Definisi Operasional : kegiatan penyediaan fasilitas komunikasi, air dan listrik untuk mendukung kelancaran operasional perangkat daerah Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: Kominfo	1	1	66,620,400.00	1	66,620,000.00	1	66,620,000.00	1	66,620,000.00	1	66,620,000.00	1	66,620,000.00	1	399,720,400.00	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika	KABUP ATEN BLITAR



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Sat ua n	DO/ Formulasi Perhitungan/Referen si Sumber Data	Basel ine Pere ncan aan (202 4)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										Perangkat Daerah Pengamp u Urusan	Lokasi				
								2025		2026		2027		2028		2029				2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)			Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)
		01.2. 08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	La por an	Definisi Operasional : layanan yang disediakan untuk mendukung kelancaran operasional dan kegiatan sehari-hari perangkat daerah. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: Kominfo	1	1	691,744,4 16.00	1	361,549 ,309.46	1	365,8 60,80 2.54	1	370,215 ,406.52	1	374,6 13,56 4.67	1	379, 055, 698. 13	1	2,543, 039,19 7.33	PD Pengampu urusan komunika si dan informatik a	KABUP ATEN BLITAR
		01.2. 08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	La por an	Definisi Operasional : penyediaan materai untuk mendukung kelancaran administrasi perangkat daerah. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: Kominfo	1	1	2,980,000 .00	1	2,980,0 00.00	1	2,980, 000.0 0	1	2,980,0 00.00	1	2,980, 000.0 0	1	2,98 0,00 0.00	1	17,880 ,000.0 0	PD Pengampu urusan komunika si dan informatik a	KABUP ATEN BLITAR



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Sat ua n	DO/ Formulasi Perhitungan/Referen si Sumber Data	Basel ine Pere ncan aan (202 4)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										Perangkat Daerah Pengamp u Urusan	Lokasi				
								2025		2026		2027		2028		2029				2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)			Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)
		01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah an daerah yang berfungsi baik	Per se nt ase	Definisi Operasional : barang milik daerah yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang dipelihara agar berfungsi dengan baik Formulasi Perhitungan: jumlah barang milik daerah yang dipelihara ----- X 100 jumlah seluruh barang milik daerah pada perangkat daerah Sumber Data: Kominfo	100	10 0	284,457, 860.00	10 0	186,29 9,084.3 4	100	188,1 62,07 5.17	10 0	190,04 3,694.1 7	100	191,9 44,13 2.88	100	193, 863, 573. 27	100	1,234, 770,4 19.83	PD Pengampu urusan komunika si dan informatik a	KABUP ATEN BLITAR
		01.2. 09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Un it	Definisi Operasional : kegiatan dan biaya yang berkaitan dengan pengelolaan kendaraan dinas yang digunakan oleh pejabat atau pegawai untuk menjalankan tugas dinas. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: Kominfo	12	12	128,910,0 00.00	12	128,910 ,000.00	12	128,9 10,00 0.00	12	128,910 ,000.00	12	128,9 10,00 0.00	12	128, 910, 000. 00	12	773,46 0,000. 00	PD Pengampu urusan komunika si dan informatik a	KABUP ATEN BLITAR



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Sat ua n	DO/ Formulasi Perhitungan/ Referen si Sumber Data	Basel ine Pere ncaan (202 4)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										Perangkat Daerah Pengamp u Urusan	Lokasi				
								2025		2026		2027		2028		2029				2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)			Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)
		01.2. 09.01 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	Unit	Definisi Operasional : kegiatan yang dilakukan untuk merawat, memperbaiki, dan memperbaharui fasilitas serta infrastruktur yang mendukung operasional gedung atau bangunan lainnya. Formulasi Perhitungan: cukup jelas Sumber Data: Kominfo	1	1	155,547,860.00	1	57,389,084.34	1	59,252,075.17	1	61,133,694.17	1	63,034,132.88	1	64,953,573.27	1	461,310,419.83	PD Pengampuru urusan komunikasi dan informatika	KABUP ATEN BLITAR
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemda survey	Nilai	Nilai Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Pemerintah Daerah (metode survey)	85,53	85,55	2,181,071,000.00	85,60	2,062,077,990.00	85,70	2,165,181,889.50	85,80	2,273,440,983.98	86,00	2,387,113,033.17	86,50	2,506,468,684.83	86,50	13,575,353,581.48	PD Pengampuru urusan komunikasi dan informatika	KABUP ATEN BLITAR	
	2.16.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi	Nilai (skala 1-100)	Rilis hasil penilaian monev Komisi Informasi Jawa Timur	92,70	93,00	2,181,071,000.00	93,20	2,062,077,990.00	93,50	2,165,181,889.50	93,80	2,273,440,983.98	94,00	2,387,033.17	95,00	2,506,468,684.83	95,00	13,575,353,581.48	PD Pengampuru urusan komunikasi dan informatika	KABUP ATEN BLITAR	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/ Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Basel ine Pere ncanaan (202 4)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Perangkat Daerah Pengamp u Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)			Tar get	Pagu (Rp)
		2.16. 02.2. 01.00 17	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundang an	Per mo ho na n	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5	5	227,450,0 00.00	8	179,400 ,785.13	10	188,3 70,82 4.39	12	197,789 ,365.61	15	207,6 78,83 3.89	15	218, 062, 775. 58	15	1,218, 752,58 4.59	PD Pengampu urusan komunika si dan informatik a	KABUP ATEN BLITAR
		2.16. 02.2. 01.00 19	Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Re ko me nd asi	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	2	2	318,360,0 00.00	2	233,014 ,812.87	3	244,6 65,55 3.51	3	256,898 ,831.19	4	269,7 43,77 2.75	4	283, 230, 961. 39	4	1,605, 913,93 1.71	PD Pengampu urusan komunika si dan informatik a	KABUP ATEN BLITAR
		2.16. 02.2. 01.00 21	Sub Kegiatan Pengelolan Media Komunika si	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juk nis	Me dia	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	129	12 9	1,635,261 ,000.00	12 9	1,340,3 50,693. 50	130	1,407, 368,2 28.18	13 0	1,477,7 36,639. 58	135	1,551, 623,4 71.56	140	1,62 9,20 4,64 5.14	140	9,041, 544,67 7.96	PD Pengampu urusan komunika si dan informatik a	KABUP ATEN BLITAR
		2.16. 02.2. 01.00 23	Sub Kegiatan Penyusun an Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Ko nte n	Jumlah Konten Informasi Publik	5,107	30 00	0.00	5,1 07	154,655 ,849.25	5413	162,3 88,64 1.71	57 37	170,508 ,073.80	6081	179,0 33,47 7.49	6,446	187, 985, 151. 36		854,57 1,193. 61	PD Pengampu urusan komunika si dan informatik a	KABUP ATEN BLITAR



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/ Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline Pencapaian (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
		2.16.02.201.0024	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	orang	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	64	40	0.00	64	61,862,339.70	64	64,955,456.69	64	68,203,229.52	80	71,613,391.00	100	75,194,060.54	341,828,477.44	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika	KABUPATEN BLITAR	
Meningkatnya efektivitas, efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas pelayanan publik berbasis digital sehingga terwujud sistem layanan publik dan administrasi pemerintah yang terintegrasi	2.16.03	PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Keterpaduan Layanan Administrasi Pemerintahan	Nilai	Nilai pada indeks Pemerintah Digital pada indikator 28	4	3.8	4,765,735,250	1,71-2,01	5,055,743,962.50	1,71-2,01	5,308,531,160.63	1,91-2.3	5,573,957,718.66	1,91-2.3	5,852,655,604.59	2,01-2,44	6,145,288,384.82	2,01-2,44	32,701,912,081.19	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika	Kab Blitar	
			Tingkat Kematangan Keterpaduan Pelayanan Publik Digital	Nilai	Nilai pada indeks Pemerintah Digital pada indikator 30	3	3.2		1,71-2,01		1,71-2,01		1,91-2.3		1,91-2.3		2,01-2,44	2,01-2,44	2,01-2,44	2,01-2,44	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika		
		2.16.03.201	KEGIATAN: Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah	Dokumen	Jumlah dokumen Pengelolaan Nama Domain sub domain di lingkup pemerintah daerah	1	1	4,236,488,500	1	75,836,159.44	1	79,627,967.41	1	83,609,365.78	1	87,789,834.07	1	92,179,325.77	4,655,531,152.47	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika	Kab Blitar	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Sat ua n	DO/ Formulasi Perhitungan/Referen si Sumber Data	Basel ine Pere nnaan (202 4)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										Perangkat Daerah Pengamp u Urusan	Lokasi				
								2025		2026		2027		2028		2029				2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)			Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)
		2.16. 03.2. 01.00 04	SUB KEGIATAN : Pengelolaa n Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Penyeleng garan Pemerinta h Daerah dan Pengelolaa n Nama Domain Pemerinta h Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Do ku me n	Jumlah Dokumen pengelolaan nama domain	2	2	4,236,488 ,500	2	75,836, 159.44	2	79,62 7,967. 41	2	83,609, 365.78	2	87,78 9,834. 07	2	92,1 79,3 25.7 7	2	4,655, 531,15 2.47	PD Pengampu urusan komunika si dan informatik a	
		2.16. 03.2. 02	KEGIATAN: Pengelolaan E-governme nt di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik yang telah terintegrasi ke dalam satu portal	Per sen tase	(jumlah layanan publik yang sudah terintegrasi/jumlah layanan publik)x 100%	-	20	529,246, 750	20	4,979,9 07,803. 06	20	5,228, 903,1 93.22	30	5,490,3 48,352. 88	30	5,764 ,865, 770.5 2	40	6,05 3,10 9,05 9.05	40	28,04 6,380, 928.7 2	PD Pengamp u urusan komunika si dan informatika	Kab Blitar
			- Jumlah aplikasi atau layanan digital yang dikembangkan atau ditingkatkan ;	lay an an		jumlah aplikasi/layanan digital/modul yang dikembangkan atau dipelihara	-	4		4		4		6		6	8	8	8	8	8	PD Pengampu urusan komunika si dan informatika	
			- Tingkat adopsi layanan digital oleh aparaturn pemerintah;	Per sen tase		(jumlah OPD yang terdapat layanan digital/jumlah OPD)x 100%	-	20		20		20		30		30	40	20	20	20	20	PD Pengampu urusan komunika si dan informatika	
			- Persentase layanan digital yang memenuhi standar manajemen layanan digital;	Per sen tase		(Jumlah layanan digital yang sesuai standar/Jumlah layanan digital)x 100%	-	20		20		20		30		30	40	20	20	20	20	PD Pengampu urusan komunika si dan informatika	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/ Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baseline Pencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
				- Persentase layanan digital yang memiliki hak cipta;	Persentase	(Jumlah layanan digital yang memiliki hak cipta/jumlah layanan digital)x 100 %	-	20		20		20		30		30		40		20		PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika	
				- Waktu rata-rata penyelesaian gangguan teknis sistem layanan digital;	Jam	rata-rata waktu penyelesaian gangguan layanan digital	-	100		100		100		80		80		50		50		PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika	
				~Jumlah pelatihan atau sosialisasi layanan;	Kegiatan	jumlah kegiatan literasi digital	-	2		2		2		4		4		4		2		PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika	
				- Persentase anggaran kegiatan yang terserap secara efektif;	Persentase	(jumlah anggaran terserap/jumlah total anggaran)x 100%	90,33	92		95		95		97		97		97		97		PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika	
		2.16.03.2.02.0013	SUB KEGIATAN Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	6	8	44,354,400	10	34,859,354.62	14	36,602,322.35	16	38,432,438.47	20	40,354,060.39	24	42,371,763.41	24	236,974,339.25	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika	Kab Blitar
		2.16.03.2.02.0019	SUB KEGIATAN : Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1	2	109,185,450	4	149,397,234.09	4	151,638,192.60	4	159,220,102.23	6	167,181,107.35	6	175,540,162.71	6	912,162,248.99	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika	Kab Blitar



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Sat ua n	DO/ Formulasi Perhitungan/Referen si Sumber Data	Basel ine Pere ncan aan (202 4)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										Perangkat Daerah Pengamp u Urusan	Lokasi				
								2025		2026		2027		2028		2029				2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)			Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)
		2.16. 03.2. 02.00 24	SUB KEGIATAN Penyeleng garaan Jaringan Intra Pemerinta h Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Per an gk at Da era h	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	0	0	0	52	24,899, 539.02	52	26,14 4,515. 97	52	27,451, 741.76	52	28,82 4,328. 85	52	30,2 65,5 45.3 0	52	137,58 5,670. 89	PD Pengampu urusan komunika si dan informatik a	Kab Blitar
		2.16. 03.2. 02.00 25	SUB KEGIATAN : Koordinasi pemanfaat an Portal Pelayanan Pemerinta h Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatk an Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintaha n, dan/atau Portal Data Nasional	La ya na n	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	0	2	0	4	149,397 ,234.09	4	151,6 38,19 2.60	4	159,220 ,102.23	6	167,1 81,10 7.35	6	175, 540, 162. 71	6	802,97 6,798. 99	PD Pengampu urusan komunika si dan informatik a	Kab Blitar
		2.16. 03.2. 02.00 26	SUB KEGIATAN : Fasilitasi penyeleng garaan Audit TIK sesuai kewenang an Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelengga raan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Do ku me n	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	0	0	0	1	39,839, 262.42	1	41,83 1,225. 55	1	43,922, 786.82	1	46,11 8,926. 16	2	48,4 24,8 72.4 7	2	220,13 7,073. 43	PD Pengampu urusan komunika si dan informatik a	Kab Blitar



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/ Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline Pencapaian (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
		2.16.03.2.02.0028	SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Laporan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	0	0	0	4	149,397,234.09	4	151,638,192.60	4	159,220,102.23	4	167,181,107.35	4	175,540,162.71	4	802,976,798.99	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika	Kab Blitar
		2.16.03.2.02.0032	SUB KEGIATAN : Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Aplikasi	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	0	2	356,348,800	4	388,432,808.64	4	381,709,933.10	6	400,795,429.76	8	420,835,201.25	10	441,876,961.31	10	2,389,999,134.06	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika	Kab Blitar



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/ Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline Pencapaian (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
		2.16.03.2.02.0033	SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Laporan	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	0	0	0	1	149,397,234.09	1	151,638,192.60	1	159,220,102.23	1	167,181,107.35	1	175,540,162.71	1	802,976,798.99	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika	Kab Blitar
		2.16.03.2.02.0034	SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	0	0	0	5	24,899,539.02	10	26,144,515.97	12	27,451,741.76	16	28,824,328.85	16	30,265,545.30	16	137,585,670.89	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika	Kab Blitar
		2.16.03.2.02.0036	SUB KEGIATAN : Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	0	0	0	52	3,286,739,150.02	52	3,294,209,011.73	52	3,458,919,462.31	52	3,631,865,435.43	52	3,818,707,207.20	52	17,485,191,766.69	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika	Kab Blitar



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/ Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline Pencapaian (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatorif										Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi				
								2025		2026		2027		2028		2029				2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
		2.16.03.2.02.0037	SUB KEGIATAN : Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Dokumen	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	2	4	0	4	189,236,496.52	4	193,469,418.15	4	203,142,889.06	4	213,300,033.51	6	223,965,035.18	6	1,023,113,872.42	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika	Kab Blitar
		2.16.03.2.02.0038	SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas	Dokumen	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas	2	4	19,358,100	4	229,075,758.94	4	230,071,740.50	4	241,575,327.53	6	253,654,093.90	6	266,336,798.60	6	1,240,071,819.47	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika	Kab Blitar
		2.16.03.2.02.0039	SUB KEGIATAN : Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Dokumen	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	0	0	0	4	39,839,262.42	6	41,831,225.55	8	43,922,786.82	10	46,118,926.16	15	48,424,872.47	20	220,137,073.43	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika	Kab Blitar



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Sat ua n	DO/ Formulasi Perhitungan/ Referen si Sumber Data	Basel ine Pere naan (202 4)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Perangkat Daerah Pengamp u Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)			Tar get	Pagu (Rp)
		2.16.03.3.02.0013	SUB KEGIATAN : Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah start-up digital yang dibina di wilayah kabupaten/kota yang sudah memiliki purwarupa produk	Unit	Jumlah start-up digital yang dibina di wilayah kabupaten/kota yang sudah memiliki purwarupa produk	0	0	0	0	-	2	151,638,192.60	2	159,220,102.23	4	167,181,107.35	4	175,540,162.71	4	653,579,564.89	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika	Kab Blitar
		2.16.03.4.02.0014	SUB KEGIATAN : Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah Kabupaten Blitar	Persentase tingkat adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah Kabupaten Blitar	Persentase	(jumlah unit yang sudah adopsi/jumlah semua unit)x 100%	0	0	0	0	-	25	73,204,644.71	30	76,864,876.94	40	80,708,120.79	50	84,743,526.83	50	315,521,169.26	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika	Kab Blitar
		2.16.03.4.02.0015	SUB KEGIATAN : Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital	Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	orang	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital	0	0	0	4	124,497,695.08	4	125,493,676.64	4	131,768,360.47	4	138,356,778.49	6	145,274,617.42	6	665,391,128.09	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika	Kab Blitar



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Sat ua n	DO/ Formulasi Perhitungan/Referen si Sumber Data	Basel ine Pere ncana an (202 4)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										Perangkat Daerah Pengamp u Urusan	Lokasi				
								2025		2026		2027		2028		2029				2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)			Targe t	Pagu (Rp)	Targ et	Pagu (Rp)
	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai tahapan dan prinsip Satu Data Indonesia	2.20.02	PROGRAM : PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standart	Persen	Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standart dibagi jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan statistik sektoral dikali 100 persen Berdasarkan petunjuk dari BPS, PD yang dimaksud adalah setara eselon 2, sehingga kecamatan tidak menjadi cakupan	97	97	573,998,900	97	815,000,000.00	100	820,000,000.00	100	830,000,000.00	100	845,000,000.00	100	855,000,000.00	100	4,738,998,900.00	PD pengampu urusan Statistik	Kabupaten Blitar
		2.20.02.2.01	KEGIATAN : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standart	Persen	Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standart dibagi jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan statistik sektoral dikali 100 persen	97	97	573,998,900	97	815,000,000.00	100	820,000,000.00	100	830,000,000.00	100	845,000,000.00	100	855,000,000.00	100	4,738,998,900.00	PD pengampu urusan Statistik	
		2.20.02.2.01.0017	SUB KEGIATAN : Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Persen	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS dibagi dengan jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dikalikan 100 persen	99	100	15,532,800	100	122,250,000.00	100	123,000,000.00	100	124,500,000.00	100	126,750,000.00	100	128,250,000.00	100	640,282,800.00	PD pengampu urusan Statistik	



		2.20.02.2.01.0018	SUB KEGIATAN : Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Per sen	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi 4 prinsip SDI dibagi dengan jumlah kegiatan statistik sektoral di pemerintah daerah dikalikan 100 persen.	99	100	434,624,000	100	122,250,000.00	100	123,000,000.00	100	124,500,000.00	100	126,750,000.00	100	128,250,000.00	100	1,059,374,000.00	PD pengampu urusan Statistik
--	--	-------------------	--	--	---------	--	----	-----	-------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	------------------	------------------------------



bersifat unik.

Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia untuk digunakan bersama.

Jumlah dan daftar kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan di Pemerintah Daerah perlu diidentifikasi terlebih dahulu, dapat berkoordinasi dengan BPS sebagai pembina statistik sektoral



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/ Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline Pencapaian (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi				
								2025		2026		2027		2028		2029				2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
		2.20.02.2.01.0019	SUB KEGIATAN : Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Persen	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses dibagi jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan dikalikan 100 persen. Akses data dapat melalui portal data terintegrasi. Pengguna data tidak harus publik/umum, namun disesuaikan dengan sifat/klasifikasi data, mencakup data: sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan terbuka.	99	100	9,646,800	100	146,700,000.00	100	147,600,000.00	100	149,400,000.00	100	152,100,000.00	100	153,900,000.00	100	759,346,800.00	PD pengampu urusan Statistik	
		2.20.02.2.01.0020	SUB KEGIATAN : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	Jumlah pegawai di pemerintah daerah yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang statistik baik oleh pembina data statistik maupun dari pihak lain yang kompeten.	54	63	77,164,000	126	301,550,000.00	126	303,400,000.00	126	307,100,000.00	126	312,650,000.00	126	316,350,000.00	693	1,618,214,000.00	PD pengampu urusan Statistik	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Sat ua n	DO/ Formulasi Perhitungan/ Referen si Sumber Data	Basel ine Pere ncaan (202 4)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Perangkat Daerah Pengamp u Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)			Tar get	Pagu (Rp)
		2.20. 02.2. 01.00 21	SUB KEGIATAN : Pelaksana an Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang d dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Per sen	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan dibagi dengan jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan pemerintah daerah dikali 100 persen. Dokumen perencanaan berisikan rancangan setiap tahapan penyelenggaraan statistik, diantaranya mencakup spesifikasi kebutuhan data, rancangan metodologi, instrumen, pengumpulan data, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi.	100	10 0	37,031,30 0	10 0	122,250 ,000.00	100	123,0 00,00 0.00	10 0	124,500 ,000.00	100	126,7 50,00 0.00	100	128, 250, 000. 00	100	661,78 1,300. 00	PD pengampu urusan Statistik	
Terwuj udnya kepatu han terhada p standar t keaman an informa si perang kat daerah		2.21. 02	PROGRA M : Penyeleng garaan Persandia n dan Pengama nan Informasi	Tingkat kesiapan pengamana n informasi pemerintah daerah	Sk or	Nilai berkisar 0 hingga 100 Belum Siap (0-25) Kurang Siap (26-50) Cukup Siap (51-65) Siap (66-80) Sangat Siap (81-100) Rilis BSSN	75 (versi 4.2) diko nversi 53 (versi 5.0)	55	380,490, 000	60	365,00 0,000.0 0	65	370,0 00,00 0.00	70	380,00 0,000.0 0	75	390,0 00,00 0.00	80	400, 000, 000. 00	80	2,285, 490,0 00.00	PD pengamp u urusan Persandia n	Kabupa ten Blitar



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Sat ua n	DO/ Formulasi Perhitungan/ Referen si Sumber Data	Basel ine Pere ncnaan (202 4)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										Perangkat Daerah Pengamp u Urusan	Lokasi				
								2025		2026		2027		2028		2029				2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)			Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)
		2.21. 02.2. 01	KEGIATAN : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Kebijakan Keamanan Informasi (Kebijakan SMKI)	Do ku me n	Jumlah Dokumen Kebijakan Keamanan Informasi (Kebijakan SMKI)	1	2	380,490, 000	2	300,00 0,000.0 0	2	305,0 00,00 0.00	2	315,00 0,000.0 0	2	325,0 00,00 0.00	2	335, 000, 000. 00	2	1,960, 490,0 00.00	PD pengamp u urusan Persandia n	Kabupa ten Blitar
		2.21. 02.2. 01.00 05	SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	La por an	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	1	380,490,0 00	1	35,000, 000.00	1	35,00 0,000. 00	1	35,000, 000.00	1	35,00 0,000. 00	1	35,0 00,0 00.0 00.0 0	1	555,49 0,000. 00	PD pengamp u urusan Persandia n	Kabupa ten Blitar
		2.21. 02.2. 01.00 07	SUB KEGIATAN : Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandia n Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Per an gk at Da erah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	0	0	0	52	230,000 ,000.00	52	235,0 00,00 0.00	52	245,000, ,000.00	52	255,0 00,00 0.00	52	265, 000, 000. 00	52	1,230, 000,00 0.00	PD pengamp u urusan Persandia n	Kabupa ten Blitar



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Sat ua n	DO/ Formulasi Perhitungan/ Referen si Sumber Data	Basel ine Pere ncan aan (202 4)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Perangkat Daerah Pengamp u Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)			Tar get	Pagu (Rp)
		2.21. 02.2. 01.00 08	SUB KEGIATAN : Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandia n Pemerinta h Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelengga raan persandian	Do ku me n	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	0	0	0	2	35,000, 000.00	2	35,00 0,000. 00	2	35,000, 000.00	2	35,00 0,000. 00	2	35,0 00,0 00.0 0	2	175,00 0,000. 00	PD pengamp u urusan Persandia n	Kabupa ten Blitar
		2.21. 02.2. 02	KEGIATA N : Penetapa n Pola Hubungan Komunik asi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupate n/Kota	Persentase Sistem Elektronik yang telah menerapkan prinsip Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	Per se n	Jumlah Sistem Elektronik yang menerapkan SMKI / Jumlah Sistem Elektronik x 100%	0	50 %	0	55 %	65,000, 000.00	60%	65,00 0,000. 00	65 %	65,000, 000.00	70%	65,00 0,000 .00	1	65,0 00,0 00.0 0	80%	325,0 00,00 0.00	PD pengamp u urusan Persandia n	Kabupa ten Blitar



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Sat ua n	DO/ Formulasi Perhitungan/ Referen si Sumber Data	Basel ine Pere ncan aan (202 4)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Perangkat Daerah Pengamp u Urusan	Lokasi		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)	Tar get	Pagu (Rp)			Tar get	Pagu (Rp)
		2.21. 02.2. 02.00 02	SUB KEGIATAN : Operasion alisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandia n Pemerinta h Daerah	Jumlah Operasionali sasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	Ke gia tan	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	0	0	0	12	65,000, 000.00	12	65,00 0,000. 00	12	65,000, 000.00	12	65,00 0,000. 00	12	65,0 00,0 00.0 0	12	325,00 0,000. 00	PD pengampu urusan Perencana an	Kabupa ten Blitar



4.4.2. Uraian Sub Kegiatan Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah adalah serangkaian kegiatan strategis yang dirancang dan dipilih secara selektif oleh pemerintah daerah untuk menjawab tantangan utama, mempercepat pencapaian visi-misi kepala daerah, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Program ini merupakan turunan langsung dari RPJMD Kabupaten Blitar 2025-2029 dan menjadi fokus utama dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan selama periode lima tahunan. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blitar dimana Dinas Kominfotiksan mengemban Misi 3 (tiga) dengan dua sasaran, diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Blitar 2025-2029 sebagaimana dalam rangka menunjang keberhasilan mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berintegritas, maka terdapat 3 (tiga) dari 5 (lima) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah yang relevan dengan Dinas Kominfotiksan Kabupaten Blitar sehingga diharapkan memiliki daya ungkit terhadap keberhasilan pencapaian sasaran Misi III yaitu:

1. Internet Gratis

Perluasan akses wifi publik di kantor-kantor pemerintahan maupun tempat-tempat umum untuk kemudahan akses informasi dan layanan publik bagi masyarakat, meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, serta mendukung transformasi digital.

Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian.

2. Penyediaan Ruang Publik Kreatif

Tujuan penyediaan ruang publik kreatif untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi kreatif lokal, menambah fasilitas olahraga dan kegiatan rekreasi, membangkitkan kreativitas masyarakat mengembangkan usaha produktif, maupun mempermudah interaksi sosial, yang dapat berupa ruang terbuka atau ruang terbangun.

Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Dinas Lingkungan Hidup.

3. Satu Data Kabupaten Blitar

Integrasi data dan optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan data bagi perencanaan pembangunan.

Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian dan Bappedalitbang.

Adapun Uraian Subkegiatan Renstra Dinas Kominfotiksan Kabupaten Blitar 2025-2029 sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah dimuat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.3.

Uraian Subkegiatan Dinas Kominfotiksan Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas RPJMD 2025-2029	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian				
1	2.16.03. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan publik akibat kemudahan	2.16.03.2.02 KEGIATAN: Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 2.16.03.2.02.0013	Tujuan RPJMD: Mewujudkan Kualitas Tata Kelola dan Pelayanan Publik yang Akuntabel



No	Program Prioritas RPJMD 2025-2029	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
		akses melalui platform digital.	<p>SUB KEGIATAN: Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional. 2.16.03.2.02.0013</p> <p>SUB KEGIATAN: Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE. 2.16.03.2.02.0024</p> <p>SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota. 2.16.03.2.02.0025</p> <p>SUB KEGIATAN: Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi. 2.16.03.2.02.0028</p> <p>SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE. 2.16.03.2.02.0032</p> <p>SUB KEGIATAN: Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE. 2.16.03.2.02.0033</p>	<p>Berbasis Teknologi Informasi</p> <p>Sasaran RPJMD: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien.</p>



No	Program Prioritas RPJMD 2025-2029	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			<p>SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah. 2.16.03.2.02.0034</p> <p>SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan. 2.16.03.2.02.0036</p> <p>SUB KEGIATAN : Penyediaan Akses Internet. 2.16.03.2.02.0037</p> <p>SUB KEGIATAN: Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah. 2.16.03.2.02.0038</p> <p>SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas. 2.16.03.2.02.0038</p> <p>SUB KEGIATAN: Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi.</p>	
2	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam	2.20.02.2.01 KEGIATAN: Penyelenggaraan statistik sektoral di	



No	Program Prioritas RPJMD 2025-2029	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
		penyelenggaraan statistik sektoral daerah.	lingkup daerah Kabupaten/Kota. 2.20.02.2.01.0018 SUB KEGIATAN: Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia. 2.20.02.2.01.0019 SUB KEGIATAN: Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral.	
3	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya keamanan siber dan sandi di lingkungan pemerintah daerah.	2.21.02.2.01 KEGIATAN: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 2.21.02.2.01.0007 SUB KEGIATAN: Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah. 2.21.02.2.01.0008 SUB KEGIATAN: Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah.	



4.5. Target Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Bagian Penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bitar adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Sehingga indikator kinerja lembaga atau unit kerja, perlu dirancang metode atau teknik dan tata cara yang jelas dan sistematis sebagai instrumen penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bitar dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bitar tahun 2025-2029. Target indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bitar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bitar selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bitar.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar memiliki indikator kinerja yang akan dicapai dalam periode 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Blitar. Indikator pembangunan merupakan tolak ukur pencapaian pembangunan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian misi Bupati/Wakil Bupati terpilih.

Sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 merupakan salah satu pendukung RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029, karena Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mampu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian yang mengerucut pada layanan berbasis teknologi informasi sehingga ada keterkaitan dengan Misi-3 yaitu Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat.

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan Indikator kinerja yang dipilih secara selektif dengan target terukur yang mencerminkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra. adalah seperti tertuang dalam tabel berikut ini :



Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kominfotiksan

Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Basel ine (2024)	Target Tahun						Ketera ngan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Indeks SPBE	skor	Hasil Evaluasi Menpan RB	4	4,38	1,71 – 2,01	1,71 – 2,01	1,91- 2.3	1,91- 2.3	2,01 – 2,44	Aptika
Indikator Sasaran 1 : Nilai Aspek Teknologi Digital	Skor	Nilai Aspek Teknologi Digital pada Indek Pemerintah Digital untuk tahun 2026-2030, untuk tahun 2025 masih menggunakan indek SPBE dengan indikator yang lama yaitu pada Domain Tata kelola SPBE sub Teknologi Informasi dan Komunikasi. Target pada tahun 2026 berbeda karena sudah menggunakan indek yang baru. Target nasional untuk tahun 2025: 3 dan 2028 : 2	4	4,38	1,71 – 2,01	1,71 – 2,01	1,91- 2.3	1,91- 2.3	2,01 – 2,44	Aptika
Indikator Sasaran 2 : Nilai Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Skor	Nilai Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah pada Indek Pemerintah Digital untuk tahun 2026-2030, untuk tahun 2025 masih menggunakan indek SPBE dengan indikator yang lama yaitu pada Domain Tata kelola SPBE sub Penyelenggara SPBE. Target pada tahun 2026 berbeda karena sudah menggunakan indek yang baru. Target nasional untuk tahun 2025: 3 dan 2028:2	3	4,38	1,71 – 2,01	1,71 – 2,01	1,91- 2.3	1,91- 2.3	2,01 – 2,44	Aptika
Indikator Sasaran 3 : Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	Merupakan ukuran tingkat akuntabilitas kinerja, yaitu sejauh mana perangkat daerah mampu menunjukkan keterkaitan yang logis dan terukur antara perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian hasil (outcome) dari program dan kegiatan yang dilakukannya, sesuai dengan prinsip manajemen berbasis kinerja.	B 68,95	BB 72,5	BB 73,5	BB 74,5	BB 75,5	BB 76,5	BB 78	Sekret ariat

Indikator	Satuan	Definisi Operasional/ Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Basel ine (2024)	Target Tahun						Ketera ngan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Indikator Sasaran 4 : Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi	Skor	Merupakan suatu kondisi dimana suatu badan publik menunjukkan peningkatan dalam memenuhi kewajibannya untuk menyediakan, mengumumkan dan melayani permintaan informasi publik secara proaktif, cepat, tepat waktu, dan transparan, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 14 tahun 2008 atau UU KIP. Rilis Komisi Informasi Jawa Timur	92.70	93.00	93.20	93.50	93.80	94.00	95.00	IKP
Indikator Sasaran 5 : Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	IPS adalah alat statistik yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja institusi pemerintah (KLDI) dalam penyelenggaraan statistik sektoral.	2,9	2.6-3.0	2.6-3.0	2.65-3.1	2.65-3.1	2.7-3.2	2.7-3.2	Statisti k
Indikator Sasaran 6 : Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Skor	Indeks KAMI adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan (maturity level) penerapan keamanan informasi pada suatu instansi, berdasarkan aspek-aspek : tata kelola, manajemen risiko, pengendalian teknologi, serta kesadaran dan budaya keamanan informasi. Skor 0-100 dengan sumber data dari BSSN	75 (versi 4.2) dikon versi 53 (versi 5.0)	55 (Cuku p Siap)	60 (Cuku p Siap)	65 (Cuku p Siap)	70 (Siap)	75 (Siap)	80 (Siap)	Persan dian dan KI

4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan bagian dari seperangkat ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu program dan kegiatan dalam mencapai tujuan. Indikator yang digunakan ini berisikan target yang akan dicapai setiap tahunnya sesuai dengan referensi sumber data dan formulasi perhitungan yang telah



ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Kunci di jelaskan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kominfotiksan (RPJMD)

Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formula Perhitungan/Referensi Sumber Data	Base line (2024)	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Urusan Komunikasi dan Informatika										
Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Kontern Informasi Publik Pemerintah Daerah	Skor atau %	Survey	82.79	85.55	85.6	85.7	85.8	86	86.5	Hasil Survey Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Kontern Informasi Publik Pemerintah Daerah oleh Diskominfotiksan
Jumlah Area Publik Terkoneksi Internet	Titik Area	Titik Area yang terkoneksi internet di wilayah kabupaten blitar	25	351	358	365	372	379	384	Jumlah Titik Area yang Terkoneksi Internet
Urusan Statistik										
Indikator Sasaran 5 : Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks / Poin	IPS adalah alat statistik yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja institusi pemerintah (KLDI) dalam penyelenggaraan statistik sektoral.	2,9	2.6-3.0	2.6-3.0	2.65-3.1	2.65-3.1	2.7-3.2	2.7-3.2	Permendagri 18/ 2020
Urusan Persandian										
Indikator Sasaran 6 : Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Indeks / Skor	Indeks KAMI adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan (maturity level) penerapan keamanan informasi pada suatu instansi, berdasarkan aspek-aspek :	75 (versi 4.2) dikonversi 53 (versi 5.0)	55 (Cukup Siap)	60 (Cukup Siap)	65 (Cukup Siap)	70 (Siap)	75 (Siap)	80 (Siap)	Permendagri 18/ 2020



Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formula Perhitungan/Referensi Sumber Data	Base line (2024)	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		tata kelola, manajemen risiko, pengendalian teknologi, serta kesadaran dan budaya keamanan informasi. Skor 0-100 dengan sumber data dari BSSN								



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Tahun 2025–2029 ini disusun sebagai arah kebijakan dan pedoman pelaksanaan program dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Renstra ini mencerminkan komitmen dinas untuk memperkuat peran strategisnya dalam pengembangan sistem komunikasi dan informatika, pengelolaan data dan statistik yang terintegrasi, serta pengamanan informasi pemerintahan melalui sistem persandian yang andal. Seluruh rumusan kebijakan dan indikator kinerja dalam dokumen ini telah diselaraskan dengan RPJMD serta agenda pembangunan nasional dan daerah.

Selama periode 2025–2029, terdapat tiga prioritas utama yang menjadi fokus Dinas Kominfo Statistik dan Persandian. Pertama, **transformasi digital pemerintahan** melalui pengembangan infrastruktur TIK yang merata, peningkatan kapasitas SDM digital, serta penyediaan layanan publik berbasis elektronik yang mudah diakses, efisien, dan inklusif. Kedua, **penguatan statistik sektoral dan tata kelola data**, dengan menekankan pada integrasi sistem data lintas perangkat daerah untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis bukti. Ketiga, **penguatan keamanan siber dan persandian**, guna menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi strategis pemerintah daerah, sekaligus membangun kesadaran keamanan informasi di kalangan ASN dan masyarakat.

Keberhasilan implementasi Renstra ini tidak hanya bergantung pada internal Dinas, tetapi juga memerlukan kolaborasi aktif lintas sektor, mulai dari instansi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat. Sementara itu, Kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten



Blitar (SDM, Anggaran, Sarana, Prasarana, Teknologi) dirasa masih sangat terbatas untuk menjalankan berbagai peran strategis daerah. Walaupun dengan kondisi yang apa adanya, Dinas Kominfotiksan Kabupaten Blitar terus tetap memberikan kontribusi yang optimal dalam mewujudkan Pemerintah Kabupaten Blitar Berdaya Berjaya sesuai dengan Visi Pemerintah Daerah. Selain itu, Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala guna memastikan efektivitas pelaksanaan program dan fleksibilitas kebijakan dalam merespons dinamika teknologi dan kebutuhan publik.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar berpedoman pada prinsip-prinsip berikut:

- a. **Kesesuaian Regulasi**
Seluruh pelaksanaan program dan kegiatan wajib mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk RPJPD, RPJMD, Permendagri, Permen Komdigi, Perka BSSN RI, Perka BPS RI dan Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati terkait struktur organisasi dan tata kerja.
- b. **Keterpaduan dan Sinkronisasi**
Renstra dilaksanakan secara terpadu dengan dokumen Renja PD, RKPD, RKA, dan SIPD, serta diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya.
- c. **Efisiensi dan Efektivitas**
Setiap program dan kegiatan dirancang dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai hasil maksimal dengan pengelolaan sumber daya serta berdampak nyata baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.
- d. **Partisipasi dan Akuntabilitas Publik**
Pelaksanaan Renstra melibatkan pemangku kepentingan daerah dengan memperhatikan mekanisme pengaduan publik guna terjamin transparansi dan akuntabilitas.



e. Responsivitas terhadap Dinamika

Renstra dilaksanakan dengan terus melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang dinamis terhadap perubahan lingkungan strategis, perkembangan teknologi informasi, dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang.

f. Monitoring dan Evaluasi

Dalam pelaksanaan Renstra akan dilakukan proses monitorin dan evaluasi sebagai bentuk pengendalian dan catatan kedepannya untuk menyusun perencanaan yang lebih baik dan lebih optimal.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra dilakukan secara berkala dan berkelanjutan melalui mekanisme monitoring, evaluasi kinerja dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi dilakukan terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dan pengambilan Keputusan strategis dalam penyusunan Renja PD dan RKA setiap tahun. Dokumen Renstra ini dapat ditinjau ulang jika terdapat perubahan yang mendasar dalam lingkungan strategis yang mengharuskan adanya penyesuaian dalam arah kebijakan, target kinerja maupun rencana program dan kegiatan yang harus dilakukan penyesuaian ulang.

Pelaksanaan Evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan Renstra ini dilaporkan melalui LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, untuk selanjutnya dievaluasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar. Bentuk dari hasil evaluasi dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas LKjIP Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Blitar yang merupakan bagian dari penilaian dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*).

